

“Tra urus rakyat, urus kepentingan masing-masing”

PAPUA AKTUAL 2008

(Januari – Maret)



Sekilas Informasi

OLEH

SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA

www.hampapua.org

Jayapura

Juli 2008



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Bagian I : Lintasan Peristiwa Januari – Maret 2008

- I. Hak – Hak Sipil dan Politik
 - A. Kebebasan Warga
 - B. Pertahanan dan Keamanan
 - C. Penyelenggaraan Pemerintahan
 - D. Penanganan Konflik
 - E. Aspirasi 'M'(erdeka)
 - F. Pemekaran vs Otsus
- II. Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - A. Hak Atas Pendidikan
 - B. Hak Atas Kesehatan
 - C. Kesejahteraan Umum
 - D. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Bagian II : Analisis Peristiwa

- I. Apakah Hak Hidup Orang Papua Dilindungi?
- II. Virus KKN
- III. Sengketa Pemekaran Tanpa Ujung
- IV. Tuntutan Aspirasi M(erdeka)
- V. Konflik Tanah Marak
- VI. Pemenuhan Hak atas Pendidikan Makin Merosot
- VII. Hak atas Kesehatan Terbengkalai
- VIII. Antara dana dan kesejahteraan rakyat
- IX. Sengketa Sumber Daya Alam

Penutup : Tra urus rakyat, urus kepentingan masing-masing

KATA PENGANTAR

Dalam edisi No.13 Seri Papua Aktual ini, kembali kami menyoroti peristiwa-peristiwa kunci yang menjadi potret keadaan hak asasi manusia di Tanah Papua selama triwulan pertama 2008 ini. Kami mencoba menjalin dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tersebut sehingga kiranya menjadi satu cerita yang lebih besar. Semoga kumpulan catatan peristiwa dan analisis atas rangkaian kejadian ini, membekali pembaca, khususnya para petugas Gereja di wilayah Keuskupan Jayapura, dalam memahami lebih dekat segala hiruk pikuk peristiwa yang mengalir di hadapan kita tanpa banyak kita sadari.

Meski amat terlambat dari rencana semula, edisi kali ini merupakan edisi pertama dimana tim relawan ambil bagian besar dalam penulisan lintasan peristiwa dan analisis. Tentu sumbangan ini amat berarti dan sekaligus sedang terus disempurnakan dalam proses pembelajaran.

Selamat membaca!

Tim Kronik SKP Jayapura &
J. Budi Hernawan ofm

Bagian I

Lintasan Peristiwa

Januari – Maret 2008

I. Hak-Hak Sipil Politik

A. Kebebasan warga

8 Januari

Tiga mama penjual noken berlambang bendera Bintang Kejora, yakni Mama Sely Pigome, Yohana Pigome, dan Agustina Doo dipanggil oleh oknum preman yang mengaku dari kepolisian Polresta Jayapura. Mereka dimintai keterangan dan membuat surat pernyataan agar tidak menjual anyaman berlambang bendera Bintang Kejora lagi, namun kedua mama itu menolak permintaan polisi tersebut. (lihat www.hampapua.org)

9 Januari

Mama-mama penjual anyaman noken berlambang bendera Bintang Kejora melakukan protes ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebab polisi melarang penjualan anyaman yang bergambar bendera Bintang Kejora. (lihat www.hampapua.org)

Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengatakan undang-undang otonomi khusus mengharuskan adanya lambang daerah dan ada aturannya. Karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah pergi ke Jakarta untuk membicarakan dengan Pemerintah Pusat sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2007 tentang lambang daerah tersebut.

31 Januari

Setelah 3 orang narapidana (NAPI) pembongkaran gudang senjata di Kodim 1702/ Jayawijaya berhasil dikembalikan ke Abepura pada bulan Maret 2007 lalu, maka sekarang giliran 5 orang lagi dipulangkan dari Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sari, Makassar ke Papua oleh Komisi F DPR Provinsi Papua, yang diketuai oleh Ir. Weynand Watori. Lima orang yang dipulangkan masing-masing adalah Linus Hiluka, Tinamus Wenda, Enos Yakobol 20 tahun hukuman penjara, sedangkan Yastai Murib dan Mumbungga Telenggen divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembongkaran gudang senjata semuanya berjumlah 9 orang namun 1 orang telah meninggal dunia yakni Michael Heselo.

Di Kampung Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Omanggan Wonda (25 tahun) ditembak mati oleh Satuan TNI Yonif 756 Rajawali, dipimpin Komandan Pos Letda Sumaryono beserta lima orang anak buahnya melaksanakan patroli di kampung tersebut. Korban ditembak saat dia membuka pintu rumahnya.

1 Februari

Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Max Donald Aer, membenarkan adanya peristiwa penembakan terhadap salah satu warga sipil di Puncak Jaya berdasarkan laporan Kapolres Puncak Jaya AKBP Chris Rihulay. Hal yang sama juga diungkapkan Kapendam XVII/ Cenderawasih, Letkol. Imam Santoso bahwa pihaknya telah memerintahkan anggotanya tidak boleh bertindak kasar terhadap pihak-pihak yang berlawanan dengan pemerintah, sebab mereka bukan musuh tetapi saudara yang hanya memiliki perbedaan pandangan hidup.

Danrem 173/PVB Biak mengatakan. "Kami sudah mendapat laporan bahwa prajurit TNI menembak warga Tinggimambut namun belum mengetahui secara lengkap kronologi kejadian tersebut dan alasan penembakan karena cuaca di wilayah itu sangat buruk sehingga menghambat proses pengiriman laporan mengenai insiden tersebut". Kapendam XVII/Cendrawasih, Letkol. Imam Santoso menjelaskan bahwa berdasar informasi yang diterimanya, penembakan terjadi Kamis, 31 Januari sekitar pukul 20.00 wit. Peristiwa tersebut terjadi pada saat anggota Yonif 756 Rajawali, dipimpin Komandan Pos Letda Sumaryono beserta lima orang anak buahnya melaksanakan patroli. Patroli ini dilakukan setelah mendapatkan informasi dari warga bahwa di daerah tersebut sering terjadi pemalangan yang dilakukan kelompok bersenjata sehingga membuat warga setempat resah. Dalam patroli yang dilakukan ini, ditemukan sekelompok orang yang sedang bermain gapple di sebuah honai, maka diberikan tanda tembakan peringatan berulang kali menyebabkan warga ini langsung melarikan diri, namun salah satu dari mereka yaitu Omanggan Wonda lari ke arah pintu depan untuk membuka pintu dan langsung terkena tembakan

Terkait peristiwa tewasnya warga sipil, Omanggan Wonda (25) tahun di Kabupaten Puncak Jaya akibat penembakan oleh salah satu anggota pasukan Yonif 756, Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Lukas Enembe, S.IP merasa kesal atas permintaannya kepada Kodam XVII Cendrawasih agar pasukan Yonif 751 dipertahankan walaupun orang-orangnya diganti. Ia menilai bahwa kesatuan Yonif 756 tidak merakyat dan mereka dianggap sangat baru bagi masyarakat di Puncak Jaya sedangkan Kesatuan Yonif 751 adalah kesatuan yang sudah lama di Puncak Jaya dan mereka sangat menyatu dengan masyarakat.

4 Februari

Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja–Gereja Baptis Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman mendesak semua pihak di Puncak Jaya agar segera membentuk Tim independen untuk menyelidiki kasus penembakan terhadap Omanggan Wonda. Socrates mengatakan, kasus penembakan seperti ini sudah banyak kali terjadi di Papua sehingga untuk mencari kebenaran dan guna penanganan lanjut harus dibentuk sebuah Tim Investigasi Independen.

9 Februari

Jack Wanggai, pemimpin kelompok pro kemerdekaan di Manokwari, mengancam akan menggunakan kekuatan militer jika pemerintah mengabaikan tuntutan mereka untuk mengadakan dialog politik dengan rakyat Papua seperti dilakukan terhadap Aceh. Dalam aksinya Jack Wanggai dan pendemo membawa Bendera Bintang Kejora dan spanduk bertuliskan "Ras Melanesia menuntut Referendum".

18 Februari

Anggota Kongres Amerika Serikat asal Samoa, Eni Hunkin Faleomavaega, dan anggota lainnya, Donald Payne, menulis surat kepada Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, yang berisi desakan agar Dewan Keamanan PBB bertindak terhadap keadaan hak asasi manusia di Papua yang mengkuatirkan karena tindakan aparat keamanan terhadap orang Papua.

19 Februari

Pangdam XVII/ Cenderawasih, Mayjen. Soetanto menyatakan bahwa pihaknya sudah menangkap dan menahan dua prajurit yang diduga sebagai pelaku penembakan Omanggan Wenda di Desa Tingginambut, Puncak Jaya.

23 Februari

Ketua Forum Komunikasi Generasi Muda Perjuangan Pembebasan Irian Barat, Nico Mauri memberikan saran terhadap rencana pemulangan 600 warga Papua dari Negara tetangga Papua New Guinea. Menurutnya bahwa jangan sampai ada kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan memberikan sasaran kepada pemerintah agar jangan hanya memberikan perhatian serius kepada warga Papua yang pulang dari Luar Negeri dan mengabaikan masyarakat yang sudah lama menetap di tanah air. Menurutnya jika ini terjadi maka akan muncul kecemburuan sosial di antara masyarakat.

24 Februari

Walikota Jayapura Drs. MR Kambu, MSi merespon pelbagai kalangan yang menyarankan agar pemerintah harus mewaspadaai pemulangan sekitar 600 orang warga Papua dari Papua New Guinea. Menurut Walikota Jayapura kecurigaan itu tidak perlu terjadi karena program pemulangan warga Papua seperti ini sudah biasa dilakukan. Jika memang mereka ingin kembali ke Indonesia maka sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menerima pemulangan mereka.

25 Februari

Anggota Fraksi PDS DPRD Jayapura, Pdt. Charles Simare-mare juga ikut menanggapi dan meminta agar rencana pemulangan 600 warga Papua dari PNG jangan dipolitisir macam-macam, mereka yang akan dipulangkan juga merupakan bagian dari Warga Negera Kesatuan Republik Indonesia.

Niat dari Koalisi Senat Mahasiswa (KSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) Jayapura yang akan menggelar demonstrasi di depan kampus Uncen lama dibubarkan oleh Aparat Kepolisian Polsekta Abepura dengan alasan tidak menyampaikan surat pemberitahuan sesuai prosedur kepada pihak kepolisian. Pihak polisi yang dipimpin langsung Kapolsek AKP Dominggus Rumaropen, SH meminta agar pendemo dapat membubarkan diri karena belum terpenuhinya ketentuan demo yang di atur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

26 Februari

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Paskalis Kossy, S.Pd, MM menyambut baik kepulangan dua aktivis Papua Merdeka (Nicholas Messet & Franzalbert Yoku) ke Indonesia yang telah bertahun-tahun berjuang di luar negeri untuk melepaskan diri dari NKRI. "Keputusan yang telah diambil keduanya dan Pemerintah Indonesia sudah betul dan sangat positif. Ini bisa membuka wawasan berpikir bagi orang Papua, khususnya bagi mereka yang telah lama meninggalkan tanah air," ungapnya di ruang kerjanya.

Mantan Uskup Oxford, Inggris, mengecam Pemerintah Inggris yang tidak bertindak terhadap pelanggaran HAM yang terus menerus terjadi di Papua oleh Pemerintah Indonesia. Saat berbicara di hadapan Parlemen Tinggi, Lord Harries mengatakan bahwa ketidakpedulian Pemerintah Inggris terhadap Papua tak terbantahkan. Pemerintah Indonesia bersalah atas penyiksaan, kekejaman sistematis dan pemusnahan orang secara diam-diam (genosida) terhadap orang asli Papua.

27 Februari

Sekretaris Umum Dewan Adat Keerom, Hubertus Kwambre, SH mengatakan, hendaknya Pemerintah Kabupaten Keerom ke depannya jangan sampai menjadikan Dewan Adat mulai dari tingkat Kabupaten, distrik sampai pada tingkat kampung sebagai pemadam kebakaran. Dikatakan demikian karena selama ini terkesan pemerintah mengabaikan Dewan Adat dan Masyarakat Adat dalam pergerakan pembangunan. "Saya harap Pemerintah jangan jadikan kami Masyarakat Adat sebagai pemadam kebakaran saja," ujarnya di sela-sela pelantikan para pejabat YPPK Jayapura di SMA Taruna Dharma.

3 Maret

Terjadi bentrok antara masyarakat dan pihak kepolisian di Enarotali, Kabupaten Paniai. Berkaitan dengan peristiwa itu, Dance Takimai, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mengatakan ada 4 orang masyarakat Enarotali yang terluka akibat bentrokan itu, dua diantaranya luka ringan sedangkan dua lainnya luka berat dan sedang dirawat di Rumah Sakit Enarotali.

Terjadi aksi demo penolakan Otonomi Khusus di Abepura, Jayapura. Dalam aksi itu, dua orang pendemo diantaranya, Marten Manggaprow dan Frengki Inekep ditahan untuk dimintai keterangan. Menurut Kapolresta Jayapura, AKBP Roberth Djoenso, kedua mahasiswa yang ditahan itu akhirnya dilepas karena tidak terbukti bersalah.

Jack Wanggai, juru bicara WPNA di Manokwari, menyatakan bahwa demo damai yang dilakukannya dimaksud untuk menyuarakan tuntutan dialog damai guna menangani kekerasan dan kemiskinan yang ada. Dia juga menolak Otsus karena dinilai gagal memperbaiki taraf hidup orang Papua sejak diundangkan pada tahun 2001.

6 Maret

Front Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (FNMP) kembali melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPR Provinsi Papua. Sehubungan dengan aksi itu, Kapolresta Jayapura, AKBP Roberth Djoenso mengatakan pihaknya terpaksa membubarkan masa aksi sebab mereka tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku. "Kami terpaksa membubarkan masa aksi karena belum mengikuti aturan hukum yang berlaku dan kedatangan diantara mereka membawa spanduk yang bergambar Bendera Bintang Kejora", kata Kapolresta.

11 Maret

Direktur SKP Jayapura, J. Budi Hernawan OFM, mewakili SKP Jayapura dan *Franciscans Internasional* menyampaikan laporan keadaan HAM di Papua (lihat www.hampapua.org/indexe.html) kepada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa saat terjadi tanya jawab antara anggota sidang dengan Pelapor Khusus PBB Urusan Penyiksaan, Profesor Manfred Nowak (dok. A/HRC/7/3/Add 3).

Joe Collins, Juru Bicara *Australia West Papua Association* Cabang Sydney mendesak PM Australia agar membicarakan masalah HAM di Papua dengan Presiden Indonesia menyusul penangkapan 13 orang pendemo dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora di Manokwari.

12 Maret

UNHCR melaporkan (www.unhcr.org/news/NEWS/47d7e7914.html) bahwa ratusan pengungsi Papua di East Awini, PNG, akan menikmati perbaikan jalan utama sepanjang

110 km yang menghubungkan Nomad ke Kiunga. Jalan inilah yang menjadi urat nadi perekonomian sekitar 2.500 orang pengungsi Papua yang biasa menjual hasil bumi ke Kiunga dan Tabubil, untuk pergi ke sekolah, ke tempat kerja dan ke rumah sakit.

13 Maret

West Papua Nasional Authority (WPNA) Otorita Nasional Papua Barat (ONPB) wilayah II Manokwari bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi se-Kota Manokwari melakukan aksi demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Manokwari. Aksi demo tersebut dilakukan untuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 / 2007 tentang Lambang Daerah, dimana Peraturan itu melarang penggunaan bendera Bintang Kejora Papua sebagai bendera. Dalam aksi itu, Polisi berhasil menangkap 12 orang pendemo karena kedapatan membentangkan Bendera Bintang Kejora, salah satu diantara mereka adalah Jack Wanggai, Juru Bicara West Papua National Authority Wilayah II Manokwari.

Front Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (FNMPP) melakukan jumpa pers di Jayapura. Dalam jumpa pers itu mereka menyampaikan pernyataan sikap sehubungan dengan tertangkapnya beberapa teman mereka, baik di Manokwari, Sorong dan Jayapura. Dalam jumpa pers tersebut juru bicara FNMPP, Marten Singgir meminta segera diadakan referendum atau jajak pendapat di Papua sebab menurut mereka otonomi khusus bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan Papua, buktinya otonomi khusus gagal untuk dijalankan dengan baik.

14 Maret

WPNA melakukan jumpa pers di Jayapura. Dalam jumpa pers itu mereka meminta kepada Pemerintah agar penahanan dan penangkapan terhadap para aktivis yang melakukan demo damai, bahkan yang sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia segera dilepaskan dan mereka mengaku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Pada kesempatan itu juga Presiden Eksekutif WPNA, Edison Waromi, SH mengatakan "Menangkap dan membunuh orang Papua tidak dapat menyelesaikan persoalan politik di tanah Papua".

Kapolda Papua, Irjen Polisi Drs. Max Donald Aer mengatakan pihaknya akan memproses para pelaku pembentangan Bendera Bintang Kejora di Manokwari sesuai hukum. Para pelaku tersebut antara lain: Daniel Sakwa (35), masyarakat; Noak Ap (25), masyarakat; Leonardus Bame (21), masyarakat; Markus Umpes (22), mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari; Marten Luther (20), mahasiswa Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari; Edy Ayorbaba (30), masyarakat; George Ayorbaba (25), masyarakat; Ariel Werimon (34), masyarakat; Silas Karlos May (16), Pelajar pada salah satu SMP di Manokwari dan Jack Wanggai (28), juru bicara Otorita Nasional Papua Barat, Wilayah II Manokwari.

Jack Wanggai, Juru Bicara Otorita Nasional Papua Barat, Wilayah II Manokwari setelah diperiksa, terkait peristiwa penolakan Peraturan Pemerintah No.77 tentang Bendera dan Lambang Daerah, langsung ditahan. Kuasa hukumnya, Yan Christian Warinusi sangat menyesali tindakan Polisi sebab tanpa melakukan pemanggilan namun langsung menangkap Jack Wanggai untuk diperiksa, padahal sesuai aturan, penangkapan dapat dilakukan setelah panggilan kedua tidak dihadiri oleh tersangka. Setelah Jack Wanggai ditahan, Yan Christian Warinusi selaku kuasa hukum mengajukan surat penagguhan penahanan, namun polisi menolaknya dengan alasan hukuman tersangka diatas lima tahun.

16 Maret

Guna memperingati peristiwa tragedi bentrok 16 Maret 2006 antara masyarakat dengan polisi dan dampaknya, SKP Jayapura dan KPKC Sinode GKI di Tanah Papua menyelenggarakan diskusi mengenai Laporan Kunjungan Utusan Khusus Sekjen PBB Urusan Pembela HAM, Ibu Hina Jilani (A/HRC/7/28/Add 2), yang disampaikan pada Sidang Dewan HAM PBB VII di Jenewa, Swiss. Kegiatan tersebut bertempat di STT I.S. Kijne Abepura.

19 Maret

LSM Internasional yang bermarkas di Amerika Serikat, *Human Rights Watch*, menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar segera membebaskan 9 orang yang ditangkap oleh polisi Manokwari saat berdemo terhadap PP 77/2007, khususnya satu anak berumur 16 tahun. Penangkapan dan penahanan aktivis demo damai melanggar hak kebebasan mengungkapkan pendapat dan berkumpul.

17 Maret

Wakil Gubernur, Alex Hesegem, SE minta agar para tersangka kasus makar harus diproses sesuai hukum, baik tersangka yang ditangkap di Manokwari maupun di Jayapura. "Makar ya makar dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Indonesia,"ujarnya.

Majelis Rakyat Papua menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.77 tahun 2007 tentang lambang daerah. Penolakan itu dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Majelis Rakyat Papua No. 03/PIM –MRP/2008, yang ditandatangani oleh Pimpinan MRP, Drs. Agus Alue Alua M,Th didampingi Wakil Ketua I, Ir. Frans A. Wospakrik, M.sc dan Wakil Ketua II, Dra. Hanna Hikoyabi, tentang posisi Bendera Bintang Kejora dalam tata hukum Indonesia. Selain itu, Majelis Rakyat Papua juga meminta agar para tersangka kasus makar dilepas.

18 Maret

Menurut Kepala Biro Hukum Provinsi Papua, JKH Rumbiak, dalam Peraturan Pemerintah No. 77/2007 tentang Lambang Daerah, ada terjadi kesalahan misalnya pada pasal 6 ayat 4 dijelaskan bahwa desain logo daerah tidak boleh ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi atau gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu Pemerintah Provinsi Papua merencanakan akan berbicara dengan Pemerintah Pusat terkait peraturan tersebut, sebab telah menimbulkan konflik di masyarakat.

19 Maret

Ketua MRP, Drs. Agus A. Alua, M.Th yang didampingi wakil ketua I, Ir. Frans A. Wospakrik, M.Sc dan wakil ketua II, Dra. Hanna Hikoyabi menegaskan bahwa MRP hanya ingin memposisikan masalah Lambang Daerah sesuai semangat dasar lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. "Kami tidak ingin berdebat soal ini, tetapi kami hanya ingin semua harus ditafsirkan sesuai dengan semangat dasar lahirnya OTSUS", kata Drs. Agus A. Alua, M. Th. Menurutnya jika PP 77/ 2007 tetap diberlakukan maka akan menimbulkan konflik.

20 Maret

Kapolresta Jayapura , AKBP Roberth Djoenso mengatakan bahwa empat pendemo dari Front Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Jayapura dinyatakan tersangka sehingga mereka ditahan. Para tersangka tersebut antara lain Zakarias Horota, Elias Weah, Abu Muri dan Rosa Tapnesa.

21 Maret

Berhubungan dengan rencana pemulangan 600 orang Warga Negara Indonesia asal Papua yang pernah mengunjungi ke Negara Papua New Guinea (PNG), maka Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Provinsi Papua, Drs. Berty Fernandes mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan para pengunjung ini akan dikembalikan sebab kini sedang diproses payung hukumnya serta sedang diadakan koordinasi antara pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota tempat mereka akan dikembalikan.

24 Maret

Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua, Thaha M. Alhamid, menegaskan supaya MRP, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Pemerintah Provinsi Papua atau siapapun agar berhenti bicara soal Peraturan Pemerintah No.77/2007 tentang bendera dan lambang daerah. Menurutnya masih banyak hal lain yang sangat penting untuk dibicarakan selain peraturan tersebut, misalnya pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan bidang kesehatan yang masih belum dirasakan oleh masyarakat Papua.

27 Maret

Ibu Olga Ranti dibawa ke pengadilan karena memaksa seorang pelajar untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang pria dewasa. Perlakuan ibu Olga Ranti tersebut merupakan balas dendam karena orang tua dari pelajar tersebut pernah berhutang yakni uang arisan padanya yang belum dibayar. Kasus itu terjadi di belakang Asrama Polisi Resimen-Hamadi, Distrik Jayapura Utara.

B. Pertahanan dan Keamanan

10 Februari

Joe Collins selaku Juru Bicara *Australia West Papua Association* (kelompok Solidaritas Papua) di Sydney, Australia, menyurati PM Australia, Kevin Rudd, yang diagendakan bertemu dengan Menlu Hasan Wirajuda di Sydney agar mengangkat dampak terhadap keadaan HAM di Papua dari Perjanjian Lombok antara Indonesia dan Australia.

19 Februari

Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Haryadi Soetanto menegaskan, pembentukan Kodam baru di Provinsi Papua Barat sangat tergantung kondisi tingkat ancaman yang ada di wilayah tersebut. Selama Kodam dan Kodim-kodim yang berada di wilayah tersebut masih mampu mengatasi keamanan, maka pemekaran kodam baru tidak perlu. "Pemekaran wilayah pemerintahan tidak harus diikuti dengan pemekaran lembaga TNI. Sebab, prosedur pembentukan kodam baru ada mekanisme dan itu disesuaikan dengan tingkat eskalasi ancaman maupun gangguan keamanan," ujarnya.

20 Februari

Lokakarya tentang HAM dan Mahkamah Pidana Internasional yang disponsori Kedutaan Besar Kanada diselenggarakan oleh Kodam XVII/ Cenderawasih. Sekitar 20 orang oditur militer AD, AL, dan AU hadir dalam kegiatan tersebut.

21 Februari

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Letjen TNI Agustadi Sasongko Purmono meminta kepada seluruh prajurit TNI untuk bisa menjauhi konflik. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja di Batalyon 751/ BS Sentani. Mantan Sekretaris Menkopolhukam itu meninjau tempat latihan menembak pistol, sekaligus melakukan simulasi menembak ke tempat sasaran di Markas Yonif 751/BS.

Humas Polda Papua, Kombes Agus Riyanto Menyatakan, Polisi Selandia Baru berminat untuk menjalin kerjasama dengan komisariss Papua guna mengembangkan program polisi untuk komunitas. Hal ini disampaikan dalam perjumpaan dengan Jaquelyn Goodwin, Manajer Polisi Selandia Baru bidang Kebijakan dan Strategi Internasional.

25 Februari

Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Umar Karim, S.Sos mewakili Bupati menegaskan bahwa tanah seluas 17 hektar yang akan digunakan untuk pembanguna Radar TNI Angkatan Udara (AU) di Merauke, siap dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke di ruang Operation Room Kantor Bupati saat menerima rombongan Kadisbangops AU, Masra Eko Djatiprioanto dan juga dihadiri oleh Tim pengadaan Tanah dari Lembaga Masyarakat Adat.

Yonif 408/Subrastha Kodam IV/ Diponegoro yang kini betugas di wilayah perbatasan RI-PNG tepatnya di Waris, Kabupaten Keerom terpaksa harus menjadi guru untuk mengajar di Sekolah Dasar (SD) Danpos Satgas Pamtas Yonif 408/ SBH Letu Inf. Suwarna mengungkapkan bahwa jumlah murid yang ada di SD tersebut ada sebanyak 38 orang yang terbagi dalam dua kelas, kelas I sebanyak 10 orang dan kelas II sebanyak 28 orang. "Yang membanggakan kami adalah ada tiga murid dari PNG. Ketiganya duduk di kelas II. Mereka memilih sekolah di Kampung Kaliasin karena di tempat tinggalnya tidak ada sekolah. Perlahan-lahan anggota kami mengajari bahasa Indonesia," ujar Suwarna.

12 Maret

Polresta Jayapura bekerjasama dengan Kodim 1701 Jayapura dan Pomdam XVII/ Cenderawasih melakukan operasi gabungan di PTC Entrop. Operasi gabungan itu dipimpin oleh Kabag Ops Polresta Jayapura, AKP Rudi Purnomo. Dalam oprasi itu mereka berhasil menangkap 6 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membawa minuman keras dalam mobil, selain itu mereka juga menyita 6 buah senjata tajam, diantaranya 3 buah parang dan 3 buah pisau dapur.

C. Penyelenggaraan Pemerintahan

7 Januari

Menteri Dalam Negeri, Mardianto, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dipercepat, semula dijadwalkan tahun 2009, namun harus dimajukan agar tidak mengganggu pemilihan presiden. "Kita akan kaji kalau bisa, bulan September sampai Oktober bisa selesai".

15 Januari

Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Komisariss Besar Polisi Drs. Paulus Waterpauw, mengatakan untuk Polda Papua sendiri, hingga akhir tahun 2007 telah mengirim enam surat izin ke Presiden untuk pemeriksaan para Bupati yang terindikasi korupsi, namun yang terjadi adalah para Bupati melakukan upaya politisasi sehingga proses penyelidikan maupun penyidikan juga menjadi terhambat. Selain itu salah satu faktor yang menyebabkan adalah minimnya dukungan dana oprasional penyelidikan.

Sekjen PDP, Thaha Al Hamid yang juga tampil sebagai pembicara dalam acara dialog dan kampanye anti korupsi ini menyatakan untuk memberantas korupsi di Tanah Papua ini adalah perlunya komitmen semua pihak, terutama pemerintah.

30 Januari

Ketua *Papua Corruption Watch* (PCW) Provinsi Papua, M. Rifai Darus, S.H mengatakan pihaknya sangat mengharapkan laporan yang mereka berikan kepada pihak Polda dan Kejati Papua terkait dugaan penyalahgunaan dana yang merugikan Negara sebesar Rp. 12 milliar dapat ditindaklanjuti karena dari pihak Kejati dan Polda telah memberikan keseriusan untuk memproses semua laporan indikasi korupsi APBD 2007.

31 Januari

Polda Papua menindaklanjuti data adanya indikasi terjadinya tindak korupsi pada pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2005–2006 di Tanah Papua yang dilaporkan oleh *Papua Corruption Watch* (PCW) sehari sebelumnya. Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kombes. Pol. Drs. Paulus Waterpauw mengatakan bahwa pihaknya sudah buat telahaan staf kepada Kapolda terkait laporan PCW.

Ketua Komisi D DPRD Marthen R Marey, S.H mengatakan pihak DPRD sulit untuk memantau penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di daerah atau Kabupaten dan kota. " Kami sulit untuk memantau pengelolaan dana–dana sektoral yang masuk ke Papua. Selama ini dana sektoral tidak melibatkan dewan karena dana–dana sektoral yang diturunkan ke daerah langsung dari departemen kepada instansi yang bersangkutan sehingga jumlah maupun perhitungan dana itu, kami sama sekali tidak tahu, jelasnya.

Dana percepatan pembangunan dinyatakan masih misterius (kabur). Hal ini diungkapkan Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua, Dr. Achmad Hatari. " Hingga sekarang, dana itu masih misterius, karena itu kami sedang *bargaining* untuk memperjelas seperti apa kebijakan itu. Jangan sebatas retorika", tugasnya di ruang kerjan.

31 Januari

Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua, Dr. Achmad Hatari mengatakan dana percepatan pembangunan yang diatur dalam Instruksi Presiden (INPRES) No. 5 Tahun 2007 yang dikeluarkan pada 16 Mei 2007 dinyatakan masih kabur. "Hingga sekarang, dana itu masih kurang jelas, karena itu kami sedang berusaha untuk memperjelas seperti apa keputusan itu, jangan sebatas retorika", katanya. Dana tersebut direncanakan akan diberikan dalam 2 tahun yaitu 2008 dan 2009 sebesar Rp 17 trilliun.

Wakil Ketua II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom, Dr. (HC) Herman Yoku menyambut baik adanya kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan

(BPKP) Perwakilan Papua dan Badan Pengawasan Pembangunan Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Keerom yang melakukan pemeriksaan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007. "Bila ada temuan penyalahgunaan anggaran, hal tersebut harus ditindak lanjuti sampai selesai, tidak boleh ada istilah bahwa Kabupaten Keerom adalah Daerah Pemerintahan Baru jadi diberi ampun", ungkapnya di Pos Polisi Kehutanan di Tanah Hitam, Abepura.

1 Februari

Kepala Biro Kepegawaian Provinsi Papua, Drs. Yesaya Buinei, MM mengatakan penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang tertunda sekian lama akan diumumkan pada pertengahan bulan Februari 2008, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang bentuk dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil khususnya di Pemerintah Provinsi Papua untuk formasi tahun 2008 hanya diberi peluang 24 orang dan terbatas pada tenaga dokter, apoteker dan para medis, sedangkan guru dan bidang teknik lainnya akan diterima di Kabupaten dan Kota.

Menurut Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua, Dr Achmad Hatari, SE, M.Si Pemerintah Provinsi Papua mengalami pemborosan anggaran sebesar Rp 87 miliar diakibatkan banyaknya struktur organisasi dalam tubuh Pemerintah Provinsi Papua. Maka pihaknya berharap agar Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang perubahan struktur kelembagaan bisa ditetapkan pada saat dilakukan perubahan anggaran tahun 2008.

2 Februari

Untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 12 miliar yang terjadi di Provinsi Papua maka Corruption Watch (PWC) akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat, untuk menyerahkan laporan dan temuan mereka.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jayapura, Mahfud Mannan, SH MH mengatakan masalah dugaan korupsi di MRP sedang ditangani oleh Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH. Menurut Mahfud Mannan, hal tersebut harus sesuai aturan yang ditetapkan yakni apabila kasusnya berupa kasus dugaan korupsi maka harus diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) selanjutnya ke Kejaksaan Agung kemudian diteruskan ke Kejaksaan Tinggi. Apabila bentuk pelanggarannya hanya berupa kesalahan administrasi maka terlebih dahulu ditindaklanjuti oleh Gubernur.

4 Februari

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono bertemu dengan perwakilan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Akademisi Papua di Kantor Kepresidenan Jakarta. Pada saat pertemuan itu, Presiden menyatakan akan mendorong Majelis Rakyat Papua bekerja lebih baik untuk mengembangkan Budaya dan Agama serta kehidupan sosial yang menjadi ciri khas orang Papua. "Majelis Rakyat Papua bukan lembaga yang berada pada bidang politik. Kita akan dukung lembaga itu untuk mengembangkan budaya dan kehidupan sosial yang bercirikan kebudayaan Papua". Kata Presiden.

Rencana pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika, untuk periode 2008–2013 yang semula dijadwalkan 26 Maret terpaksa diundur hingga 19 Mei 2008 mdatang karena keterlambatan penyerahan data pemilihan dari Pemerintah Daerah setempat kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika. "Kami baru menerima

penyerahan data pemilihan dari Pemerintah Daerah Mimika minggu lalu. Data ini harus dimutakhirkan terlebih dahulu dalam jangka waktu 1,5 bulan", kata Anna Y. Balla, S Ag. Ketua KPU Mimika.

14 Februari

Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Mimika sudah menertibkan 500 lebih atribut dari para koalisi peserta Pilkada Mimika Tahun 2008. Penertiban itu sesuai dengan hasil kesepakatan di Manna Bakery, Timika Senin 4 februari lalu. "sebagaimana telah disepakati pada tujuh poin yang ada, jika atribut yang sudah dipasang tidak dicabut, maka Panitia Pengawas akan melakukan pembersihan dan itu sudah dilakukan", jelas Ketua Panwas Kabupaten Mimika Ipda. Tonni Upuya di kantor Panwas Kabupaten Mimika.

15 Februari

Gubernur Papua, Barnabas Suebu, menyelenggarakan musrenbang bertema "Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Berbasis Kerakyatan" selama 15-21 Februari 2008 di Sasana Krida, Kantor Gubernur Jayapura. Dalam pertemuan ini selain para bupati, kepala dinas, dan sejumlah menteri, hadir juga tamu undangan dari negara-negara donor, Bank Dunia, UNDP, dan dibuka oleh Wapres Yusuf Kalla.

16 Februari

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H. Mardianto pada Pembukaan Rapat Kerja Bupati/Walikota se-Papua di Sasana Krida. sesama-sama aparat pemerintah, mengatakan tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Pertemuan yang berlangsung dua jam dan dipimpin oleh Wakil Presidenn M. Jusuf Kalla itu dihadiri oleh sejumlah menteri di antaranya Menteri Dalam Negeri Mardianto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzeta, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Fredy Numberi, Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH, Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Hardi Soetanto, Kapolda Papua Irjen Pol Max Donald Aer, Dirjen Otda Depdagri Sodjuangon Sitomorang, Wakil Ketua II DPR Papua Pakalis Kossy, Wakil Gubernur Papua Barat Rahimin Katcong, Ketua DPRD Papua Barat Demianus Idjie dan sejumlah pejabat penting lainnya.

Pemerintah Provinsi Papua membuka 36 formasi CPNS, namun jumlah pelamar atau pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mencapai 606 orang dan pelamar terbanyak adalah sarjana Ekonomi dan sarjana Hukum. "Jatah untuk formasi sarjana ekonomi dan sarjana hukum masing-masing satu orang, namun pelamarnya mencapai seratus orang lebih. Jadi tingkat persaingan untuk memperebutkan formasi ini antara 1 berbanding 10", ungkap Kepala Biro Kepegawaian Provinsi Papua, Drs. Yesaya Buinei, M.Si

Dalam musrembang se-Tanah Papua, Wapres Yusuf Kalla menegaskan agar Papua memanfaatkan kearifan lokal untuk mempercepat pembangunan dan memanfaatkan potensi SDA yang kaya di provinsi ini. Di hadapan gubernur-gubernur, walikota, dan bupati, Wapres juga menekankan pentingnya menyusun kebijakan secara kreatif dan menyelenggarakan pembangunan untuk mencapai kemajuan di segala bidang. Dalam mendirikan satu bangunan di kampung, seorang kepala desa seharusnya memanfaatkan kayu daripada batu dan semen yang butuh biaya Rp. 1 juta per sak. Ujar Wapres.

17 Februari

Walikota Jayapura Drs. MR Kambu, MSi menanggapi serius terjadinya kekosongan pada formasi CPNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura. Adanya formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot). Dikatakan pihaknya akan tetap mengupayakan agar alokasi formasi CPNS kota yang telah ditetapkan dari pusat ini tidak ada yang terbuang atau dibiarkan kosong. "Kebijakan penetapan formasi CPNS ini dari pusat, oleh karena itu saya akan sampaikan laporan dan usulan supaya bisa disetujui untuk dialihkan atau ditambahkan kepada formasi yang lain", ungkap Walikota Jayapura Drs. M.R Kambu.

18 Februari

Pertanyaan bupati di wilayah Pengunungan Tengah tentang kenapa ada sebagian Kabupaten di Pengunungan Tengah tidak mendapat dana infrastruktur sesuai amanat pasal 34 UU 21/2001, ditanggapi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Ir Jansen Monim, MMT dan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua Dr. Achmad Hatari, SE.M.Si, bahwa dana itu alokasikan ke Kabupaten lain yang aksesnya mudah tapi arahnya ke wilayah pengunungan.

19 Februari

Terkait derasnya tuntutan para Bupati dari Pegunungan Tengah Papua soal dana infrastruktur yang dinilai tidak adil, langsung disikapi Gubernur Barnabas Suebu, SH dengan merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2008. Dikatakan, untuk pelaksanaan infrastruktur 2008, yang akan berlaku adalah hasil rapat antar gubernur dan para bupati. Hal ini sampaikan saat memimpin rapat pleno hasil diskusi kelompok pada Acara Raker Bupati/Walikota Se-Papua di Sasana Krida, kantor Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.

Dalam upaya untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), salah satu program strategis yang disiapkan Pemerintah Propinsi adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur jalan. Pemprov akan membangun infrastruktur jalan sepanjang 1664 Km yang melintas beberapa Kabupaten. "Sekaya apapun wilayah itu tanpa daya dukung SDM yang berkualitas, maka daerah sulit bisa maju," ujar Gubernur IJB Bram O Atururi usai menjadi pemateri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam XVII/Cendrawasih di Makodam.

Kesulitan pengawasan penggunaan dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) diakui oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Biak Numfor, Septianus Marsyom. Hal ini disampaikan terkait adanya dugaan penyalagunaan anggaran Respek di Kampung Kanaan, Distrik Biak Barat. "Kami juga di daerah kurang tahu benar tentang program ini soal mekanismenya sehingga sulit dalam pengawasan. Mestinya ada jelas pengawasannya, jangan asal dikucurkan ke kampung lalu kurang pengawasan. Nah, kalau ada masalah penggunaannya, apakah dari provinsi mau turun ke lapangan," ujarnya di ruang kerjanya.

24 Februari

Kepala Dinas PU Propinsi Papua Ir. Jansen Monim mengatakan meski dana infrastruktur dari pemerintah pusat pada anggaran 2008 hanya berkisar Rp 330 miliar, dana untuk membiayai program infrastruktur khususnya yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Papua tetap meningkat.

25 Februari

Ketua KPU Provinsi Papua Ferry Kareth mengingatkan kepada Sekretaris, seluruh karyawan/karyawati dan anggota KPU Provinsi agar jangan terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu. Peringatan ini disampaikan pada kesempatan acara serah terima jabatan Sekretaris KPU dari pejabat lama H.M Sangadji kepada pejabat pelaksana tugas yang baru Mussa Isir, S.Sos di Aula Kantor Pemilihan Umum Provinsi Papua. "KPU tidak boleh dipengaruhi siapapun, jaga netralisasi diri maupun lembaga dan dalam bekerja harus selalu melihat aturan yang berlaku," katanya.

26 Februari

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Supiori memberitahukan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional di Kabupaten Supiori belum bisa terwujud karena masih menunggu petunjuk dari Pemerintah Provinsi Papua. "Penggunaan KTP nasional sistem digital direncanakan bulan Februari ini, namun masih menunggu petunjuk dari Provinsi sehingga belum bisa dilakukan. Kami akan melakukan koordinasi ke Provinsi lagi," ujar Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Supiori, Dra. Vera Wanggai, M.Si.

Walikota Jayapura Drs. MR.Kambu, M.Si mengaku kalau penyaluran dana *block grant* 2007 dari Pemprov Papua sebesar Rp 900 juta mengalami keterlambatan. Hal ini diungkapkan pada acara Penyerahan Dana *block grant* 2007 Distrik Abepura di halaman Kantor Distrik Abepura itu.

27 Februari

Rencana Pemerintah Pusat untuk melakukan pemangkasan terhadap APBN Tahun Anggaran (TA) 2008 sebesar 15 persen yang dikuatirkan berdampak pada Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada pemerintah daerah, rupaya belum sampai secara resmi ke tingkat Provinsi Papua. "Saya belum dengar itu. Sampai sekarang kita belum ada petunjuk tentang itu," tandas Sekda Provinsi Papua Drs. Tedjo Suprpto, MM.

5 Maret

14 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang dipimpin oleh Drs Da'i Bacthiar, SH, calon dubes untuk Kerajaan Malaysia berkunjung ke Provinsi Papua. Menurut ketua rombongan, Drs Da'i Bacthiar, SH sebelum berangkat ke tempat tugas masing-masing, mereka perlu dibekali dengan berbagai informasi yang harus disampaikan oleh para menteri dan pejabat-pejabat daerah. Menurutnya lagi, Papua menjadi perhatian karena masih banyak potensi yang dapat diangkat dalam kerjasama dengan negara-negara luar.

10 Maret

Kurang lebih 130 orang penduduk Distrik Sentani Timur berunjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jayapura. Aksi itu dipimpin oleh Ikatan Mahasiswa Papua asal Sentani. Pada aksi itu, mereka meminta agar keempat Kepala Kampung yang terpilih secara demokrasi, yakni Kepala Kampung Yokiwa, Noklola, Ayapo dan Nandali segera dilantik.

13 Maret

Tepat pukul 12:00 siang sekitar 40-an mahasiswa yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua. Mereka meminta agar Kejaksaan Tinggi segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan Pesawat Atonov dan Ijazah

palsu. Pada saat aksi, koordinator lapangan, Agus Alua mengatakan untuk kesekian kalinya pihaknya telah mendatangi Kejaksaan Tinggi namun sampai sekarang kasus korupsi di Jayawijaya belum dituntaskan. Dalam aksi itu masa membawa beberapa spanduk, dua diantaranya bertuliskan, "Stop lindungi tikus-tikus berdasi, KEJATI Papua jangan melindungi korupsi dan koruptor".

14 Maret

Bupati Jayapura, Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM menyetujui pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH yang melarang penjualan minuman keras mulai tanggal 1-10 April 2008. "Jika perlu ditiadakan saja, karena saya kira ini langkah untuk maju sehingga siapapun wajib mendukungnya", kata Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM.

26 Maret

Enam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua yang tergabung dalam tim advokasi kebijakan publik (penggugat) kembali melanjutkan sidang atas gugatannya terhadap Gubernur Provinsi Papua (tergugat) terkait perkara *legal standing* atas akses Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jayapura. Dalam sidang itu pihak penggugat menyerahkan bukti-bukti diantaranya: anggaran dasar institusi para penggugat, surat permohonan diberikannya dokumen APBD Provinsi Papua tahun 2005 dan RAPBD tahun 2006 kepada tergugat, surat permintaan dokumen APBD tahun 2006, tanda terima surat permohonan telah diterima oleh tergugat, surat permohonan permintaan dokumen APBD tahun 2007 dan tahun 2008 kepada tergugat dan bukti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Jayapura atas laporan keuangan tahun 2006 dan penggunaan anggaran tahun 2004, 2005 dan 2006, untuk diperiksa oleh Hakim Ketua.

28 Maret

Dewan Adat Mamberamo Raya yang diketuai oleh Wempi Bilasi bersama komponen Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta Partai Politik mendesak Gubernur Provinsi Papua agar segera menunjuk dan menetapkan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, sebab sejak Kabupaten tersebut dimekarkan belum ada Sekretaris Daerah.

D. Penanganan Konflik

13 Februari

Keluarga Mebri selaku pemilik tanah ulayat sepanjang Jalan perahu Komplek Ale – ale Padang Bulan melakukan pemalangan sebagian ruas jalan raya yang menghubungkan Abepura – Sentani karena merasa tanah hak mereka diambil secara diam – diam dalam program pelebaran ruas jalan raya yang awalnya hanya untuk membuat drainase, bukan memperluas ruas jalan sepanjang 60 kilometer.

14 Februari

Upaya Polres Jayapura untuk menghentikan pemalangan di Misi Adven Hari Ketujuh di Kampung Bambar, Doyo Baru, Distrik Waibu dengan membuka palang tampaknya sia – sia saja. Massa yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat kembali menduduki areal landasan pacu dan gedung Persekolahan Missi Adven. Koordinator pemalangan dari Marga Yapo bernama Beny Yapo mengatakan aksi mereka tersebut kembali dilakukan karena pihak Misi Adven Hari Ketujuh belum juga memenuhi tuntutan mereka.

19 Februari

Tanah Ulayat yang selama ini disengketakan tiga marga masing-masing Yapo, Kreuta dan Pangkatana di Doyo Baru, Distrik Waibu akhirnya dibahas di tingkat para-para adat. Ondoafi dari marga Pangkatana, Nikolas Pangkatana mengatakan, sesuai kesepakatan pihak adat, tanah itu per meter dihargai sebesar Rp 150 ribu dan diberlakukan untuk semua areal yang dipergunakan.

25 Februari

Puluhan masyarakat Suku Ongge dari Kampung Harapan, Sentani mendatangi kantor Gubernur di Dok II. Mereka menuntut realisasi pembayaran ganti rugi tahap ke-5 dari tanah yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi Papua, sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan dan kantor. Koordinator massa Jerry Ohee mengatakan bahwa sesuai dengan Keputusan MA Nomor 38/PDT/89 tahun 1989, jumlah yang harus dibayar Pemerintah Provinsi Papua kepada Suku Ongge atas penggunaan lahan seluas 62 Ha untuk kepentingan pendidikan dan perkantoran itu adalah sebesar Rp 18.6 miliar.

26 Februari

Tentang penyelesaian masalah pemalangan lokasi Adven Mesehi Hari ketujuh di Doyo belum ada titik terang meskipun telah dibahas di tingkat para – para adat. Dari pertemuan antara DPRD yang diwakili Wakil Ketua I Jumadi Kamto, Ketua Komisi A Inneke Enggelina Ibo, Komisi C, pihak Missi Advent, pihak pemilik tanah (Kepala Suku) dan sejumlah masyarakat, pihak pemilik hak ulayat menolak jika palang dibuka. " Kami sudah bertahun-tahun tidak mendapat jawaban yang pasti, makanya saya menolak membuka palang itu," kata salah seorang pemilik tanah bernama Nikolas Pangkatana. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua I Jumadi Kamto juga menyarankan supaya palang dibuka karena banyak anak sekolah yang akhirnya tidak bisa belajar dengan baik, namun Nikolas tetap menolak untuk membuka palang itu sebelum penyelesaian secara tuntas. Sementara dari pihak Misi Advent yang diwakili Ketua Daerah Mesehi Advent Hari Ketujuh Provinsi Papua, Prof DR Frans Kafiar menegaskan akan menempuh jalur hukum sebab pihaknya memiliki bukti berupa dokumen penyelesaian pembayaran.

14 Maret

13 anggota TNI Korem 173/ PVB di sidang di Pengadilan Militer Jayapura karena melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil sidang maka Partu A.M terpaksa dipecat dari keanggotaan TNI dan harus ditahan di dalam penjara selama 2 tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana perzinahan/asusila; sedangkan 12 orang lainnya dikenakan sanksi yang bervariasi sesuai dengan jenis pelanggaran mereka. Ada yang dikenakan kurungan penjara selama 4 bulan dan ada yang ditunda naik pangkat.

27 Maret

Kasat Lantas Polresta Jayapura, AKP Raydian Kakroso, S.Ik mengatakan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum POLRESTA Jayapura pada bulan Maret tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan bulan Februari. Dari data kepolisian menyebutkan pada bulan Maret ini terdapat 7 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, 4 diantaranya meninggal karena mabuk sedangkan tiga lainnya meninggal karena balapan di jalan.

E. Aspirasi Merdeka

23 Februari

Dua aktivis Perjuangan Papua Merdeka Nick Simeon Messet dan Franzalbert Yoku akhirnya kembali ke NKRI setelah 40-an tahun menjadi warga negara asing. Ini setelah akta kewarganegaraan mereka diserahkan langsung oleh Staf Khusus Wakil Presiden H.M Alwi Hamu di Pendopo Ondofolo di Jalan Ifar gunung No.2 Felavauw Sentani. Niat kedua putra Papua untuk kembali ke NKRI telah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Yusuf Kalla di Istana Wapres pada 20 September tahun lalu dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM keluar pada 29 November 2007.

25 Februari

"Perjuangan itu melelahkan tetapi tak jua terwujud", begitu kata Nicholas Simeon Messet tentang perjuangannya untuk gerakan Papua Merdeka. Menurut pengakuannya kepada publik, puluhan tahun sejak 1969, ia meninggalkan identitasnya sebagai warga Negara Indonesia dan berjuang untuk mewujudkan Papua Merdeka untuk lepas dari NKRI, namun toh hingga detik ini usaha itu tak kunjung berhasil. Padahal berbagai cara telah ia lakukan untuk mewujudkan impian yang kian meredup.

26 Februari

Berbeda dengan Nicholas Messet yang memperjuangkan Papua Merdeka melalui lobi ke sejumlah negara, maka Franzalbert Yoku (55) cukup melalui goresan penanya, ia memperjuangkan Papua Merdeka dengan tulisan-tulisannya di koran dan majalah di luar negeri.

27 Februari

Dua aktivis Papua Merdeka Nick Messet dan Franzalbert Yoku setelah mendapat akta kewarganegaraan beberapa hari lalu, jika sebelumnya bertahun-tahun berjuang di luar negeri untuk Papua Merdeka, akhirnya berpaling misi untuk mengkampanyekan ke luar negeri tentang kemajuan-kemajuan di Papua. Untuk menyampaikan niat itu, kedua aktivis ini menghadap Sekda Provinsi Papua, Drs Tedjo Suprapro, MM dan ke Kapolda Papua, Irjen Pol. Max Donald Aer.

28 Februari

Kembalinya dua mantan pejuang Papua Merdeka Nicholas Messet dan Franzalbert Yoku ke pangkuan ibu pertiwi yang ditandai penyerahan akta kewarganegaraan Indonesia (WNI) kepada keduanya, disambut baik tokoh pejuang sekaligus tokoh adat Papua, Ondoafi Ramses Ohee. Dikatakan, keinginan mereka kembali ke NKRI adalah keinginan yang lahir dari hati insan Indonesia yaitu putra bangsa, karena kemampuan mereka berada dan dimanapun berbaur dengan orang lain, tetapi darah sebagai putra bangsa tetap mengalir bahwa mereka adalah anak bangsa Indonesia. "Keinginan mereka kembali merupakan keinginan yang lahir dari suatu keputusan bahwa mereka adalah putra bangsa Indonesia dan lahir berdasarkan darah putra bangsa," ujarnya.

3 Maret

Pengajar Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Deakin, Australia, Damien Kingsbury, menanggapi pernyataan Ketua MRP, Agus A. Alua, yang mendesak Presiden agar membuka dialog tentang Papua. Hal ini dinilai sebagai langkah yang penting karena tunjukkan kesepakatan yang makin besar mengenai pentingnya meninjau hubungan Jakarta dengan Papua.

6 Maret

Di Wamena, 36 orang anggota TPN/OPM menyerahkan diri untuk bergabung dengan NKRI. Ke-36 orang tersebut berasal dari kelompok WS. Telenggen, Komandan

TPN/OPM bagian Pegunungan Tengah yang bermarkas di Tiom-Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

25 Maret

Puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Front Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (FNMP) yang dikondisir oleh Markus Yenu, menggelar aksi demo di depan Kantor DPR Provinsi Papua di Jayapura. Mereka mendesak Pemerintah Pusat agar segera mencabut UU No. 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Menurut mereka Otonomi Khusus telah gagal dan segera diadakan jajak pendapat atau Referendum, agar Orang Papua dapat menentukan nasibnya sendiri. Dalam aksi itu masa membawa beberapa spanduk yang bertuliskan "SEGENAP RAKYAT BANGSA PAPUA BARAT, RAS MELANESIA MENUNTUT REFERENDUM", "OTONOMI KHUSUS GAGAL TOTAL SEGERA REFERENDUM" dan "PBB SEGERA KIRIM PASUKAN OBSERVER INTERNASIONAL KE PAPUA".

28 Maret

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahajo Kumolo, atas nama Fraksinya menyatakan, standar ganda Amerika Serikat untuk memperjuangkan masalah Papua tampak jelas dimana ditunjukkan dalam Surat Anggota Kongres AS, Eni FH Faleomavaega dan Donald M. Payne kepada Presiden RI, yakni masalah Papua hanya bisa diatasi dengan bantuan badan khusus mereka yang bernama USAID.

F. Pemekaran VS Otsus

15 Januari

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo, Maus Asso, mengatakan pihaknya juga menyayangkan pemerintah daerah, yang terkesan memaksakan Kabupaten Yahukimo dimekarkan lagi, padahal pemeritahan Kabupaten dan Gedung Dewan saja belum ada. Itu menjadi tolak ukur dari pelaksanaan pemekaran tersebut.

Bupati Kabupaten Yahukimo Ones Pahabol, SE MM mengatakan telah mengusulkan Pemekaran Kabupaten Yahukimo menjadi 4 Kabupaten namun hal ini dibantah oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Yahukimo, Abok Busup, S.Th, M.Si.

30 Januari

Salah seorang anggota KPU Pusat, Andi Nurpati mengatakan bahwa dengan adanya inisiatif DPR – RI untuk memekarkan beberapa wilayah di seluruh tanah air akan sangat mengganggu Pemilihan Umum (pemilu) 2009. Diperkirakan bahwa dalam 1 tahun ini akan ada 13 pemilihan Gubernur, 95 pemilihan Bupati, dan 31 pemilihan walikota di seluruh Indonesia. Jadi secara keseluruhan akan dilakukan 139 Pilkada untuk tahun 2008.

1 Februari

Salah anggota Komisi E DPR Papua mempertanyakan kunjungan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Bupati Paniai, Naftali Yogi ke Kabupaten Paniai. Ia menilai bahwa kunjungan ini bukan untuk melihat langsung kejadian kecelakaan pesawat di Paniai yang menewaskan seorang warga namun ada indikasi lain bahwa keberadaan mereka di sana adalah untuk melakukan studi kelayakan terhadap 2

wilayah yang direncanakan dimekarkan dari Kabupaten Paniai, yakni Intan Jaya dan Deyai.

Inisiatif DPR-RI tentang rancangan undang-undang pemekaran empat Provinsi di Papua, diantaranya Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat dan Papua Tengah membuat Pemerintah Provinsi Papua kaget, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan MRP langsung mengadakan rapat terpadu bersama di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan langsung membentuk Tim yang terdiri 4 Pimpinan Dewan, 6 Ketua Fraksi dan 8 orang unsur Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan MRP.

Pemerintah Pusat telah berusaha untuk transparan terhadap dana Otsus kepada Pemerintah Provinsi Papua. Namun, ada pihak yang mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi belum transparan tentang berapa dana Otsus yang akan diberikan kepada setiap kabupaten/ kota di Papua. Hal seperti ini diungkapkan Kepala Pengelolah Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Jayapura Drs. Achmad Idrus, MM bahwa sampai saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) belum mendapatkan alokasi dana Otsus secara definitif dari Pemerintah Provinsi". Ia berharap agar dengan adanya sistem pengelola keuangan daerah yang baru ini bisa lebih transparan.

3 Februari

Rencana DPR Papua untuk memanggil Gubernur Papua dan Ketua MRP untuk membicarakan isu pemekaran Provinsi yang telah disusun Rancangan Undang – Undang (RUU)nya di DPR – RI benar dilaksanakan tetapi Gubernur Barnabas Suebu, S.H dan Ketua MRP, Agus Aula tidak sempat hadir dan hanya diwakilkan. Wakil Ketua II DPR Papua Paskalis Kossy, SPd,MM mengatakan, "Forum ini belum memutuskan apapun, kita hanya sepakat melimpahkan topik ini ke masing-masing lembaga".

Progo Nurdjaman menegaskan bahwa proses pengusulan pemekaran provinsi di Papua bakal terganjal apabila tidak memenuhi ketentuan atau mekanisme yang telah diatur UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 54/2005 tentang Majelis Rakyat Papua. Bila ketentuan ketiga peraturan tersebut tidak dipenuhi, maka usulan pemekaran tersebut menjadi sia-sia. Ia juga menambahkan bahwa usulan pemekaran wilayah baik provinsi dan Kabupaten yang marak akhir-akhir ini merupakan hal wajar. Sebab tujuan dari pemekaran itu tidak lain adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, proses usulan harus sesuai mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang sehingga dalam proses harus ada persetujuan dari Kabupaten induk, DPRD induk, MRP dan Gubernur. "Harus lewat proses politik, kalau tidak akan mentok di tengah jalan. Saya rasa usulan pemekaran itu hanya akan menjadi wacana yang tidak kesampaian", imbuhnya lagi.

4 Februari

"MRP sudah membentuk tim perumus untuk menentukan sikap MRP terhadap aspirasi pemekaran provinsi di wilayah Tanah Papua", ungkap Wakil Ketua I MRP Ir Frans Wospakrik. Hal ini dilakukan untuk menyikapi aspirasi pemekaran provinsi di Wilayah Tanah Papua dan tujuan terpenting dari terbentuknya tim perumus di MRP adalah bagaimana mengantar aspirasi pemekaran agar pelaksanaan pemekaran provinsi Papua berjalan sesuai dengan amanat undang – undang dan semua pihak tidak menafsir undang – undang itu sendiri – sendiri sesuai dengan versinya".

5 Februari

Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) DPR Papua menghasilkan 4 rekomendasi tentang inisiatif DPR-RI untuk membuat RUU pemekaran beberapa wilayah di Indonesia termasuk Papua yang kini menjadi pro-kontra. Hal ini diungkapkan salah satu anggota Panmus DPRP, Yan Ayomi S.Sos.

8 Februari

Direktur SKP Jayapura, J. Budi Hernawan OFM, menyatakan Papua membutuhkan mediator untuk mengawasi jalannya Otsus seperti yang terjadi di Aceh. Kerangka penanganan Helsinki dapat menjadi acuan untuk ini.

9 Februari

Wakil ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Ir. Frans Wospakrik, M.Sc mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun dan menetapkan program kerja (Pokja) pada anggaran 2008 yang akan dilaksanakan sejumlah kelompok kerja yang ada dalam MRP mulai dari Pokja Adat sampai Pokja Agama. Program kerja Adat yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan pada anggaran 2008 adalah membuat penataan hak ulayat masyarakat Papua untuk mendorong penyusunan Perdasus pengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sedangkan Pokja Agama berusaha terlibat untuk menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama di wilayah Papua agar toleransi dan kerukunan umat beragama selalu terjaga. Dan Pokja Perempuan MRP akan berupaya untuk mengangkat harkat, martabat serta memberdayakan perempuan Papua untuk keselamatan generasi Papua ke depan. Dalam HUT Kota Merauke ke-106 yang digelar diwarnai aksi pernyataan sikap dari seluruh peserta karnaval, mendukung sepenuhnya penetapan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Papua Selatan (PPS) yang dilakukan melalui inisiatif DPR RI pada Sidang Paripurna DPR RI 22 Januari lalu. Pernyataan sikap tersebut diungkapkan dalam bentuk spanduk yang diusung setiap peserta karnaval maupun secara tertulis, selanjutnya diserahkan kepada tim dan diterima Wakil Ketua II DPRD Merauke Jorgen Betaubun. Ketua tim pembentukan PPS mengatakan bahwa ini bukti nyata aspirasi masyarakat untuk pembentukan PPS bukan kepentingan para elit yang ada di Papua Selatan.

Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy D. Ijie mengatakan bahwa pihaknya akan berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat sebelum menuju rapat kerja antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat di Jayapura untuk menemui Wakil Presiden Yusuf Kalla dan menyampaikan beberapa persoalan di Papua Barat, terutama mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan landasan hukum Provinsi Papua Barat serta masalah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

10 Februari

Ketua Tim Pembentukan Provinsi Papua Tengah Norbeth Mote, SE mengatakan, " Kami tidak pernah melangkahi dua lembaga terhormat (DPRP & MRP) di Papua. Karena dalam pemikiran kami pemekaran ini untuk kepentingan rakyat Papua pada umumnya dan khususnya Papua Tengah. Maka dalam perjuangannya tidak pernah diam – diam dan tim secara terang-terangan melalui mekanisme yang berlaku, baik UU Otonomi Khusus dan juga UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah". Ia membantah komentar gubernur bahwa perjuangan para bupati yang sedang memperjuangkan tiga Provinsi untuk kepentingan mereka adalah tidak benar.

12 Februari

Sekitar 600-an orang warga masyarakat berdemo di depan kantor MRP di Kotaraja menuntut pembubaran MRP dengan membawa spanduk bertuliskan 'Bubarkan MRP dan MRP adalah boneka NKRI'. Mereka terdiri dari unsur Dewan Adat Papua, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah, dan berbagai kelompok pemuda (lihat www.hampapua.org).

Aksi massa yang mendatangi gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja dan menuntut MRP dibubarkan, dinilai Wakil ketua I DPRD Komaruddin Watubun, SH sebagai salah satu bentuk tidak pahamnya masyarakat terhadap peran dan fungsi MRP. "Masyarakat demo di MRP itu karena mereka sebenarnya tidak paham peran dan fungsi MRP, ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Dekan Fisip Uncen, Drs. Naffi Sanggenafa, MA bahwa, untuk membubarkan MRP tidak semudah apa yang dipikirkan masyarakat dan mahasiswa yang melakukan demo karena telah diatur dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus, maka tidak semudah membalik telapak tangan. Diungkapkannya juga bahwa jika masyarakat mengetahui kelemahan MRP maka untuk dibubarkan harus melalui mekanisme yang panjang. Ia mengharapkan agar lebih baik masyarakat dan mahasiswa berkumpul dan kemudian merumuskan secara tertulis apa argumentasi mereka sehingga menjadi dasar bagi DPRD dan Gubernur untuk apakah MRP harus dibubarkan.

Sedangkan, Dosen Fisip Uncen, Drs. Beatus Tambaip, MA mengatakan bahwa, masyarakat dan mahasiswa yang melakukan aksi demo ke kantor MRP adalah salah sasaran, seharusnya mereka (pendemo) ke kantor DPRD dan kantor Gubernur karena disana sebenarnya mempunyai kekuatan untuk mendeklarasikan agar Otsus berjalan di Papua. "MRP merupakan lembaga yang terbentuk dengan adanya Otsus, sehingga tidak pantas untuk MRP selalu disalahkan, tetapi yang pantas bertanggungjawab adalah DPRD dan Gubernur", paparnya.

13 Februari

Aksi mahasiswa dan masyarakat yang datang ke kantor MRP di Kotaraja dan menuntut agar MRP dibubarkan, dinilai Ketua MRP Drs. Agus Alua, M.Th merupakan suatu aspirasi yang kaget. Dikatakan aspirasi kaget karena sebelumnya tidak ada wacana tentang MRP dibubarkan, DPRD dibubarkan atau Gubernur diturunkan, sebab yang selama ini dipersoalkan adalah pelaksanaan Otonomi Khusus. Menurutnya hal ini perlu diberitahukan kepada masyarakat bahwa hasil aspirasi yang diberikan mahasiswa dan masyarakat Papua yang melakukan demo, pihaknya telah melakukan pengkajian selama 2 hari, sehingga sebenarnya MRP bertugas untuk menerima aspirasi dan menindaklanjuti. Dalam arti bahwa pihaknya akan menampung semua aspirasi kemudian apabila aspirasi itu dialamatkan kepada pemerintah daerah atau DPRD, maka akan diteruskan kepada yang bersangkutan.

Ketua Komisi F DPRD, Ir Weynand Watory, menegaskan, "Yang namanya Papua yang jumlah penduduk sedikit tetapi besar dalam isu politik, tentu semua akan bersentuhan dengan soal politik sehingga kalau kemudian MRP dibidang jangan bersentuhan dengan urusan politik, maka hal itu tidak benar". Hal ini diungkapkannya sebagai tanggapan terhadap Wakil Ketua I DPRD Papua Komarudin Watubun, S.H.

Menurut Ketua Sub Tim Pengkajian RUU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua DR. Agus Sumule, UU 21/2001 merupakan alat rekonsiliasi sekaligus jalan

keluarbagi masalah yang menghimpit di Papua dengan adanya aspirasi Merdeka oleh rakyat Papua di masa itu. Karena itu sudah seharusnya UU 21/2001 dilaksanakan secara konsekwen. Agus Sumule juga mengatakan bahwa untuk membubarkan MRP itu memang tidak bisa tetapi kalau ganti orang-orangnya boleh. Dan jika masyarakat Papua ingin MRP dibubarkan, maka masyarakat Papua bawa persoalan ini ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi dan mengatakan ada pasal dalam UU 21/2001 yang berlawanan dengan UUD 1945.

Sementara itu Wakil Ketua Bidang Politik KNPI Papua, Muflih MUSAAD, S.Sos,M.Si mengatakan, desakan masyarakat tentang MRP harus dibubar itu sah-sah saja karena hal itu merupakan penilaian masyarakat terhadap lembaga tersebut. "Secara pribadi saya berpendapat bahwa tuntutan ini sah-sah saja karena sejauh ini lembaga tersebut tidak menampakan adanya suatu kinerja yang betul-betul memperjuangkan masyarakat Papua," jelas Muflih.

14 Februari

Adanya desakan masyarakat dan mahasiswa agar MRP dibubarkan juga ditanggapi oleh Wakil Ketua Pokja Agama MRP, Pdt. Willeam F Rumsarwir bahwa MRP ada karena Otsus ada. Jadi menurutnya untuk membubarkan MRP itu tidak mungkin dan tidak profesional. Dijelaskannya bahwa MRP ada karena UU No. 21 tentang Otonomi khusus, bukan karena anggota-anggota MRP itu sendiri sehingga keberadaan anggota MRP itu bukan berdasarkan aspirasi perorangan tetapi aspirasi masyarakat yang memilih.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Drs. Agus Alua, M. Th mengatakan bahwa terkait masalah di Manokwari soal adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan pejuang telah melakukan sosialisasi PP 77/2007 tentang larangan bendera separatis dalam era Otonomi Khusus di Aceh dan Papua, dinilainya telah melanggar UU 21/2001 Otsus. "Otsus ada karena masyarakat Papua angkat bendera di Kantor DPRP dan Gubernur sampai ke pemerintah pusat, namun terjadi negosiasi sehingga Otsus datang", ujarnya.

15 Februari

Sekitar lima puluhan orang perwakilan Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Papua (KMMPP) dipimpin oleh Buktar Tabuni kembali menempti janjinya dengan mendatangi MRP untuk mendengarkan hasil keputusan rapat MRP pada Jumat (15/2) tentang usul pembubaran MRP (lihat www.hampapua.org).

16 Februari

Wapres Jusus Kalla mengungkapkan masalah Papua Barat yang sampai sekarang ini belum memiliki payung hukum bakal dituntaskan dalam dua bulan ke depan. Karena itu, sama dua bulan, persoalan payung hukum itu sudah dapat diselesaikan oleh kedua provinsi di Papua melalui kesepakatan-kesepakatan antara keduanya, termasuk pemerintah pusat. Hanya saja bagaimana konkritnya dari kesepakatan itu, Wapres tidak menjelaskan secara terperinci.

Don Flassy, peneliti Senior pada Kantor Mendagri, mengkritik rencana DPR untuk membagi Papua menjadi empat provinsi: Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Dia menegaskan bahwa rencana ini sudah ditentang oleh mayoritas orang Papua. "Rencana ini bertentangan dengan Otsus yang mengakui wilayah Papua yang memiliki keunikan, budaya, dan wilayah. Pemekaran di delapan

wilayah menjadi Provinsi Papua Tengah akan mendatangkan konflik horisontal di masa depan”.

18 Februari

5 Bupati dari pegunungan Tengah Provinsi Papua melakukan aksi *walk out* meninggalkan ruang rapat koordinasi yang dihadiri para Bupati/ Walikota se-Papua. karena kecewa dengan kebijakan Pemprov Papua selama ini. Bahkan para Bupati ini menyatakan akan berpisah dari Provinsi Papua dan segera membentuk Provinsi Pegunungan Tengah. Mereka adalah Lukas Enembe, Bupati Puncak Jaya, Wellington Wenda, Bupati Pegunungan Bintang, Nicholas Jigibalom, Bupati Jayawijaya, John Tabo, Bupati Tolikara, dan Ones Pahabol, Bupati Yahukimo.

Sementara itu, terkait aksi *walk out* beberapa Bupati wilayah pegunungan Tengah dari acara Rapat Kerja Bupati/Walikota se-Papua yang berlangsung di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, ditanggapi Gubernur Papua Barnabas Suebu, S.H. " Nanti saya akan memanggil mereka dan saya pikir mereka akan datang. Saya tidak pikir jika mereka akan membangkang". Gubernur mengatakan, para bupati diminta agar tertib, supaya rapat ini dapat berlangsung secara lancar.

Keinginan dan perjuangan masyarakat Grime Nawa untuk membentuk Kabupaten sendiri, bakal menjadi kenyataan karena usulan calon Kabupaten Grime Nawa sudah masuk dalam agenda pembahasan DPR-RI. "Kami sangat bersyukur perjuangan kami dan masyarakat Grime Nawa untuk membentuk Kabupaten sendiri telah mendapat persetujuan dari Bupati Jayapura, yakni dengan keluarnya SK Bupati Nomor 146.1/0584/SET/2006, meski sempat mengalami penundaan," ujar Ketua Umum Dewan Adat Tumutu Daerah Grime Nawa Ferdinan Yewi.

21 Februari

Menurut Walikota Jayapura, Drs. MR. Kambu, M.Si bahwa Kota Jayapura mempunyai 2 fungsi utama, yakni sebagai Ibu Kota Provinsi dan juga sebagai daerah otonom. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Jayapura harus memenuhi standar lebih dari kabupaten/ kota lain karena Kota Jayapura sebagai pusat pelayanan daerah sekitar dalam kepetingan ibu kota Provinsi. "Jadi kota Jayapura dengan fungsi ganda ini berarti ada beban dua kali lipat dibandingkan kabupaten/ kota lain, sehingga seharusnya ada perhatian lebih, termasuk dukungan dana untuk penyelenggaraan Kota Jayapura sebagai Ibu Kota provinsi dan juga sebagai daerah otonom," ungkapnya.

22 Februari

Rasa tidak adil sebagian Kepala Daerah di Papua, termasuk Walikota Jayapura Drs MR Kambu, MSi terkait minimnya penerimaan dana Otonomi Khusus, ditanggapi serius Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua DR. Achmad Hatari, SE.MSi. bahwa, pembagian dana Otsus selalu berpatokan pada norma-norma dan aturan yang berlaku. Pihaknya menggunakan format 7 variabel dalam pembagian dana Otsus. Antara lain adalah mencakup luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, besar dana alokasi umum, besar PDRB, besar pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat kesulitan.

Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, Theodorus Opki dan anggotanya telah membentuk tim untuk melakukan penolakan terhadap sikap 5 bupati asal pegunungan Tengah yang mau membentuk Provinsi Pegunungan Tengah .

Bupati Yahukimo meminta kepada Kasubdin infrastruktur Provinsi Papua agar segera turun ke wilayah Pegunungan Tengah untuk melihat perkembangan infrastruktur di sana. " Saya minta para Kasubdin untuk turun langsung ke lapangan, karena mereka belum pernah turun sehingga tidak mengetahui besaran dana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur di daerah tersebut," ungkapnya.

25 Februari

Isu pemekaran Provinsi Papua yang kembali digulirkan oleh 5 Bupati dari wilayah Pegunungan Tengah setelah walk out dari Raker Bupati/Walikota se – Papua, disikapi Komisi A DPRD yang membidangi politik, luar negeri, pemerintahan dan Otsus Wakil Ketua Komisi A DPRD Ramses Wally mengatakan dalam jumpa pers bahwa pemekaran harus sesuai dengan mekanisme yang ada dalam UU No. 21/2001 tentang Otsus khususnya pasal 76 sehingga, lima Bupati yang menyampaikan agar didirikan Provinsi Pegunungan Tengah, Komisi A memandang sebagai sikap yang berlebihan.

Sementara Anggota Komisi E DPRD yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra), Manuel Wetipo, S.E mengatakan, aspirasi yang disampaikan oleh 5 Bupati daerah Pegunungan Tengah merupakan aksi yang wajar dan secara pribadi dirinya mendukung aspirasi tersebut, mengingat selama ini daerah pegunungan banyak dijanjikan soal pembangunan namun selama berpuluh–puluh tahun masyarakat tetap hidup dalam keterisolasian.

26 Februari

Tokoh Pejuang sekaligus Tokoh Adat, Ondoafi Ramses Ohee mengatakan, tindakan 5 Bupati asal Pegunungan Tengah yang *walk out* pada Rapat Kerja Bupati/ Walikota se-Papua di Kantor Sasana Krida Jayapura adalah tindakan yang positif. Pihaknya sangat mendukung aspirasi lima Bupati anak asli Papua itu, disamping mereka merasa dana infrastruktur terlalu kecil untuk wilayah Pegunungan namun demikian mereka juga menginginkan pemekaran di wilayah mereka masing–masing karena masalah kehidupan masyarakat di Papua adalah sebagai masalah kita bersama yang tergabung dalam NKRI.

5 Maret

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP), Drs. John Ibo, MM mengatakan bahwa masalah Provinsi Papua Barat yang selama ini dipersoalkan akan segera berakhir sebab Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang mengakomodasi Provinsi Papua Barat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Rencana Presiden itu mendapat tanggapan baik dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) maupun MRP. Sedangkan Pengamat Hukum Papua, Budi Setyanto dan Drs. Mohamad Musa'ad, M.Si menyatakan tidak setuju. Menurut Budi Setyanto, kebijakan Presiden mengeluarkan perpu sesungguhnya tidak tepat bahkan dinilai berlebihan, sebab sebuah perpu hanya dapat dikeluarkan apabila negara dalam keadaan gawat, sedangkan kenyataannya Papua tidak ada keadaan darurat.

Sesudah bertemu dengan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat, Presiden SBY mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan Perpu dalam dua bulan mendatang untuk memberikan dasar hukum bagi Provinsi Papua Barat guna menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pembentukan provinsi baru tersebut. "Perpu tersebut

akan mengakui keberadaan Papua Barat dan menyelaraskannya dengan Provinsi Papua di bawah UU No. 21/2001 tentang Otsus”.

6 Maret

Muhammad Musa'ad, akademisi dari Universitas Cenderawasih, menyatakan bahwa munculnya tuntutan referendum menunjukkan orang Papua sudah bosan dengan korupsi yang disebabkan oleh Otsus yang tidak menjawab kebutuhan dasar orang Papua.

13 Maret

Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Jimmy D. Itjie di Jakarta mendesak Pemerintah Pusat dan DPR-RI melakukan perbaikan terbatas pada Undang-Undang No. 21 tahun 2001 khususnya pasal 76 soal pemekaran.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Muhammad Yusuf Kalla berjanji akan memerintahkan Fraksi Partai Golkar di DPR-RI untuk menolak usaha pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PPBD)

Dugaan adanya tandatangan persetujuan pemekaran empat Provinsi di Wilayah Papua dari ketua MRP dibantah ketua MRP, Agus Alua, MTh mengaku dirinya tidak pernah menandatangani rekomendasi persetujuan pemekaran bahkan dirinya menduga telah terjadi pemalsuan tandatangannya.

28 Maret

Tim 80, Papua Selatan (PAPSEL) Yosep Y. Mahuze di Jakarta, setelah menghadiri pertemuan utusan Papua dengan Sekretaris Menko. Polhukam. Mayjen. TNI. Rumulo R. Simbolon, mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Amanat Presiden (AMPRES) pemekaran Papua Selatan. Menanggapi hal itu, sekretaris Menko Polhukam, Mayjen TNI Rumulo R. Simbolon mengatakan pemerintah akan mengedepankan penyelesaian berdasarkan prinsip dan aturan demokrasi atau sesuai perundang-undangan yang ada.

II. HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

A. Hak atas Pendidikan

7 Januari

Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, Nehemia Wospakrik mengatakan bagi guru yang malas melakukan tugasnya harus ditindak tegas. Menurutnya, ada dugaan bahwa di sejumlah daerah yang jauh dari kota, guru-gurunya kurang disiplin melakukan tugasnya.

29 Januari

Bupati Kabupaten Keerom, Celsius Watai menyatakan, “Kami sangat berkomitmen dalam dunia pendidikan di Kabupaten Keerom”. Secara terperinci, ia menyebutkan bahwa melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran dengan menggunakan dana OTSUS menambah beberapa bangunan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah telah menyekolahkan sejumlah anak-anak Keerom pada beberapa Perguruan Tinggi di luar Papua untuk Program Strata Satu (S1) maupun Diploma Dua (D2). Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan pihak

Universitas Cenderawasih untuk Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Hubungan kerjama ini telah memasuki tahun ketiga.

31 Januari

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom, Oktovianus Nasadit, S. Sos mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom telah mengeluarkan kebijakan untuk mendatangkan guru kontrak sebanyak 40 orang dari salah satu institut di pulau Jawa, mengingat tenaga guru di daerah terpencil Keerom sangat terbatas untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Kepala Dinas mengharapkan agar para guru kontrak tersebut bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Keerom yang belum mendapat pendidikan yang selayaknya.

Di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNCEN, terjadi permasalahan antara Mahasiswa dan pihak Fakultas. Mahasiswa FKIP, program Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak (PGTK), jenjang Diploma Dua (D2), meminta agar pihak Fakultas mengambil kebijakan untuk mengizinkan mereka melanjutkan PGTK S1. menanggapi hal ini, Dekan FKIP, Drs. Festus Simbiak, M.Pd, mengatakan Pihaknya sedang berusaha untuk memperjuangkan agar di UNCEN program D2 dapat mengikuti PGTK.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Drs. Bambang Setiawan, MM Menuturkan, Dalam waktu dekat pihaknya akan bekerjasama dengan BPKP Pemerintah Provinsi dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara milik Departemen Keuangan di Jakarta, dengan menyerahkan 23 orang siswa lulusan perdana D3 Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengikuti pendidikan. Hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi agar setelah selesai, mereka dapat mengelola keuangan daerah dengan baik.

1 Februari

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Drs. James Modouw, MM Mengatakan bahwa pendidikan di daerah terpencil bukan hanya melalui pendidikan formal tetapi juga melalui pendidikan non-formal yang mengarah pada pendidikan yang sifatnya transparan, akuntabel dan dipercaya sehingga menciptakan pendidikan yang berkualitas. Dinas Pendidikan dan Pengajaran merencanakan untuk membangun SD di daerah terpencil yang didalamnya terdapat kelas 1 sampai kelas 3 yang berpola asrama dan disertai dengan pendidikan anak usia dini.

"Uang bukan segalanya untuk maju", kata Septinus Goerge Saa, salah seorang putra Papua yang mengikuti Olimpiade tingkat internasional di India dan mendapat gelar Honorable. Menurutnya banyak anak Papua genius (pintar) tetapi uang yang selalu dipikirkan terlebih dahulu. Ia mengajak kepada semua orang tua dan anak-anak Papua supaya jangan melihat uang sebagai hal yang menghambat untuk mengikuti pendidikan tetapi yang harus ditumbuhkan dalam diri anak usia sekolah adalah sifat ingin tahu, kerja keras dan merasa rugi kalau tidak pergi ke sekolah.

19 Februari

Wakil Bupati Biak Numfor, Adrianus Kafiar, SE dalam peresmian SD Inpres Yandori, Biak Barat mengatakan bahwa, sektor pendidikan adalah penentu dalam kemajuan pembangunan, terlebih jika dikaitkan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah. Menurutnya pendidikan di Kabupaten Biak Numfor mengalami kemunduran dibanding dengan zaman dulu.

Sekretaris Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Papua, Dra Johana. Tanatty mengatakan, tingkat kesadaran masyarakat untuk membaca buku di perpustakaan daerah sangat minim. Dikatakan, buku merupakan suatu kebutuhan manusia seperti halnya makan dan minum yang mana sangat bermanfaat untuk tubuh manusia, sama halnya dengan membaca buku sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan setiap manusia, khusus bagi anak-anak sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

20 Februari

Forum Guru Kabupaten Nabire mengancam akan memboikot Ujian Nasional jika pembayaran uang lauk pauk (ULP) tahun 2007 mereka tidak sesuai dengan SK gubernur. Hal ini menanggapi kebijakan Pemkab Nabire yang akan membayar ULP PNS sebesar Rp 10/hari untuk tahun 2007. Menurut Ketua Forum Guru Kabupaten Nabire Primus Butu, A.Ma.Pd ULP yang akan diterima berdasar SK gubernur adalah sebesar Rp 25 per hari.

21 Februari

Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom mendukung program pengadaan guru sukarela setelah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Keerom mendatangkan tenaga guru sukarela sebanyak 40 orang dan disebarakan ke seluruh SD yang ada di Keerom. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Keerom, Samuel Isir, S.H. sebagai langkah untuk mengatasi masalah kekurangan guru yang selama ini menjadi kendala besar dalam peningkatan mutu pendidikan itu sendiri.

Kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) yang terletak di Padang Bulan, Distrik Abepura dipalang oleh keluarga Alm. Nadap Mebri dengan cara menutup pintu masuk kampus tersebut dengan kayu. Mereka juga menempel beberapa pamflet yang bertuliskan meminta agar USTJ dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika membayar ganti rugi tanah seluas 1 hektar yang sudah 21 tahun digunakan. Kapolsek AKP Dominggus Rumaropen, S.Sos yang sudah ada di tempat langsung meminta anggota Dalmas dan anggota polisi lainnya merepatkan barisan untuk membuka palang secara paksa. "Kami minta kepada keluarga Mebri untuk menghormati kepentingan orang lain, yakni mahasiswa yang akan kuliah", kata Kapolsek.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sota Merauke yang dikenal dengan SMKN 1 Perbatasan Sota semakin diminati oleh anak-anak dari sekitar perbatasan PNG. Di tahun ajaran baru 2008/2009 mendatang tidak kurang dari 100 pelajar dari Mohet High School atau SMP Mohet meminta untuk melanjutkan pendidikan di SMKN I Sota. Hal ini diungkapkan kepala sekolah SMKN 1 Sota Drs. Calvin saya setelah dihubungi Kepala Sekolah Mohet High School, Baunop Ipati.

SD Negeri Inpres Dormena Distrik Depare Kabupaten Jayapura dipalang orang tua murid karena kepala sekolahnya, Lince Kespo tidak serius dalam menangani sekolah. Kepsek tersebut membawa kunci sekolah selama seminggu mengakibatkan kegiatan belajar-melajar tidak berjalan karena pintu tidak bisa dibuka. Parahnya lagi, para murid hampir 3 bulan tidak melaksanakan aktivitas belajar karena direhab sekolah oleh salah satu kontraktor sejak desember.

Proses hukum dugaan proyek fiktif pengadaan mebel SMA Katolik Biak di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor mulai ditindaklanjuti Polres Biak Numfor dengan melaporkan BAP, dugaan korupsi senilai Rp 349.379.000; ke Polda Papua.

23 Februari

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Keerom untuk bekerjasama dengan kalangan perguruan tinggi di negara ini tidak luput dari perhatian Direktur Yayasan Pendidikan dan Persekolah Katolik (YPPK) Kabupaten Keerom, Silvester Loby, S.Sos. "Soal kerjasama dengan Uncen Jayapura maupun perguruan tinggi lainnya itu memang suatu terobosan yang baik dan memang itu perlu ditindaklanjuti, namun harus dilihat permasalahan yang mendasar yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

24 Februari

Seorang warga tuna netra (buta) di Polimak bernama David (52) mengatakan Tuhan itu Maha Adil. Ia mengaggap bahwa kebutaan yang diderita adalah bagian dari anugerah Tuhan yang diberikan kepadanya dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ia sangat berprinsip bahwa pendidikan baginya adalah paling penting khusus bagi anak-anaknya. David menghidup keluarga, dan menyekolahkan anaknya dengan menjual sapu dan kaset di kota Jayapura. "Kami berjualan sapu dan kaset ini hanya nasib-nasib saja. Ya, kadang laku kadang tidak sama sekali. Bahkan beberapa hari keliling kota Jayapura, barang yang saya bawa tetap utuh. Tapi mau apalagi saya tetap syukuri, bersabar dan tidak pernah putus asa," ujarnya.

25 Februari

Dalam rapat kerja Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) di Tanah Papua di Aula Yapis pusat di Dok V Jayapura Ketua yayasan, Drs. H. Zubaer D. Hussein mengatakan Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) di Tanah Papua merupakan salah satu yayasan yang memiliki peran penting dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi generasi muda Papua. Yayasan ini telah berdiri sejak 1968 sehingga dapat dikatakan Yapis merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang pertama dan terbesar di Tanah Papua.

Ujian Nasional (UN) akan dilaksanakan secara serentak dan tidak diperbolehkan ada UN yang ditunda pelaksanaannya. Hal tersebut diungkapkan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pusat Dr. Suharsono, MM, MPd setelah memberikan materi pada rapat koordinasi dan sosialisasi Ujian Akhir Nasional Berstandar Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional (UN) Provinsi Papua Tahun Ajaran 2007/2008 di Aula Dinas P dan P Provinsi Papua.

Mantan Kepala Subdin Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor selaku pemimpin kegiatan pengadaan meubelair senilai Rp 349 juta yang diduga fiktif, Drs. Hengky Rumkabu, mengatakan siap diperiksa kapan saja. "Saya siap diperiksa, cuma saya sayangkan Polres Biak terkesan kurang profesional dan terlalu buru-buru menyampaikan kasus ini ke Polda. Sebab, ada kasus korupsi dan perkara lain di Polres Biak yang sudah dinyatakan tersangka tapi dipetieskan," ujarnya.

27 Februari

Pengusutan secara tuntas dugaan kasus korupsi dana fiktif pengadaan mebel sebesar Rp 349 juta di Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2006, tetap diseriusi Polres Biak Numfor. Pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP," kata Kapolres Biak Numfor AKBP Kif Aminanto, S.IK, SH. Sementara itu, mantan Kepala

Subdin Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Biak Numfor selaku pemimpin kegiatan pengadaan mebel, Drs. Hengky J. Rumkabu menegaskan. "Soal permintaan pengadaan mebel ada suratnya pada saya. Kalau ada penolakan atau tidak setuju dari sekolah, itu urusan intern mereka," tandasnya.

12 Maret

Saat memberikan pengarahan dalam acara asistensi rencana penyusunan program 2009 di Aula Dinas Pendidikan dan Pangajaran Provinsi Papua, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Drs. James Modouw mengatakan, untuk meningkatkan pembangunan pendidikan maka yang harus dilakukan adalah pemenuhan tenaga pengajar. Pemenuhan tenaga pengajar itu harus diutamakan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

19 Maret

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran kotamadya Jayapura, Dra. W.W. Kambuaya, MM mengungkapkan pihaknya sedang berupaya mendorong sistem pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan (PAKEM), namun kemampuan eksata pelajar di Wilayah Kota Jayapura masih kurang sehingga perlu untuk ditingkatkan.

24 Maret

Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke, Drs. Nicolaus Fredy Talubun, M.Pd mengharapakan pemerintah memperhatikan nasib para guru yang bertugas di pedalaman dengan membangun perumahan bagi mereka. Sebab kebanyakan guru yang bertugas dipedalaman tidak mempunyai tempat tinggal sehingga mereka terpaksa menyekat ruangan kelas yang kosong sebagai tempat tinggal.

25 Maret

Ratusan guru melakukan aksi demo di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya karena merasa tidak puas terhadap pembayaran dana kesejahteraan guru yang sebenarnya diperuntukkan bagi para guru yang bertugas di daerah terpencil, namun kenyataannya banyak diterima oleh para guru yang bertugas di perkotaan.

29 Maret

Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura, Prof. Dr. Berth Kambuaya mengatakan aksi mogok mengajar yang dilakukan para guru di Wamena, Kabupaten Jayawijaya merupakan kerugian besar bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Aksi mogok tersebut merupakan suatu indikasi perlunya perhatian khusus bagi para guru, lebih khusus bagi mereka yang bertugas di pedalaman.

B. Hak atas Kesehatan

14 Januari

Kepala Balai Karantina Hewan Kelas II Jayapura, mengatakan ternak babi dari Manado dilarang didatangkan ke Papua, karena dianggap bisa menyebabkan penyakit Hog Colera, yakni penyakit yang menyerang ternak babi dan menyebabkan kematian hanya dalam jangka waktu 1X24 jam.

30 Januari

Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom tahun 2008 menganggarkan uang makan untuk pasien rawat inap di Puskesmas Plus Arso Swarkarsa. Hal ini diungkapkan oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, drg. Lopulalan, MS.

dr. Alexander M Thesia Mengatakan, Awal tahun 2008 ini penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) dinyatakan meningkat di Puskesmas Kotaraja penderita kebanyakan anak-anak, dan peringkat kedua adalah malaria tropika, penyakit kulit dan diare.

31 Januari

Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Paulus Waterpauw mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan Undang-Undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 untuk menjerat orang yang membuat, memakai dan menjual minuman keras yang menyebabkan satunya banyak korban. Tujuan dari penerapan undang-undang ini adalah untuk mengantisipasi timbulnya banyak korban jiwa, karena minuman keras dapat mengganggu keamanan dan merusak organ tubuh.

1 Februari

Menurut Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, jumlah orang yang terkena HIV-AIDS di Kabupaten Merauke terus bertambah. Terhitung Tahun 1992 sampai bulan Desember Tahun 2007 berjumlah 969 orang (angka komulatif). Diantaranya sepanjang tahun 2006 ditemukan 85 terinfeksi dan tahun 2007 sebanyak 81 orang positif HIV-AIDS. Dana Percepatan Pembangunan Provinsi Papua yang dijanjikan Pemerintah Pusat akan direalisasikan pada akhir tahun 2007 ini, dipertanyakan Gubernur Papua Barat, Abraham Atururi. Karena sampai awal Januari belum ada tanda-tanda dari Pemerintah Pusat. Beliau juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menanyakan hal ini kepada Gubernur Papua, Barnabas Suebu, S.H terkait dana itu, sebab Pemerintah Pusat telah memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Papua bahwa jumlah dana yang akan berikan untuk Provinsi Papua Barat untuk tahun 2007 sebesar Rp 1,2 Triliun dari Rp 5,7 T yang diusul.

Dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire yang dijadwalkan bulan November 2008 ini, Pemerintah Daerah Nabire menganggarkan dana sebesar Rp 15,6 miliar. Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah, Natalis Degei, S.Sos bahwa plafon dana Pemilihan Kepala Daerah tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA).

4 Februari

Menyambut Hari Pekabaran Injil Yesus Kristus di Tanah Papua yang ke-153 yang biasanya diperingati oleh Umat Kristen di Tanah Papua, Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, mengajak warga jemaat untuk peduli dan menyoroti masalah HIV-AIDS.

5 Februari

Persekutuan Gereja-gereja di Papua dan Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama di Papua merayakan hari damai Papua dan mencanangkan gerakan melawan HIV-AIDS. Pencanaan ini dilakukan di Taman Imbi, Jayapura.

12 Februari

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kerom, I Kadek Hermanta, S. KM mengatakan, ditemukan gejala kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Arso 2, Distrik Arso kabupaten Keerom, oleh Puskesmas Plus Arso Swarkarsa. Dinas Kesehatan Kabupaten

Keerom melakukan tanggap pertama turun ke lapangan melakukan kegiatan foging (pengasapan) pada areal yang dicurigai berkembangnya kasus DBD itu.

17 Februari

Dari hasil pemantauan dan evaluasi Badan Penasehat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, terungkap bahwa Kabupaten Jayapura patut dijadikan sebagai Kabupaten percontohan dalam penanggulangan penyakit HIV-AIDS. Hal ini disampaikan Ketua Badan Penasehat KPA Nasional dr. Saryadi Gunawan di Kampung Yokiwa. "Kami melihat pak Bupati aktif dalam penanggulangan penyakit HIV-AIDS di Kabupaten Jayapura selama ini", ungkap Suryadi.

18 Februari

Besarnya jumlah dan aktivitas Pekerja Seks Jalanan (PSK) di Kota Jayapura, mendapat perhatian serius dari Wakil Walikota Jayapura Soedjarwo, BE yang juga Ketua Harian KPA Kota Jayapura. "Selama ini upaya penertiban dan razia dari Dinas Trantib bekerjasama dengan Polresta Jayapura sudah dilakukan secara periodik, penanganan keberadaan PSK ini juga perlu koordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun pihak terkait lainnya," ungkapnya.

19 Februari

Wakil Sekretaris Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura, dr. I Gede Tirtayasa, Sp.B mengatakan, untuk sementara ini pelayanan operasi tidak maksimal karena salah satu alat yang digunakan dalam kegiatan operasi mengalami kerusakan, yaitu sterilator. Alat ini berfungsi untuk mensteril alat-alat yang nantinya digunakan dalam melakukan operasi. Untuk sementara ini kami hanya melakukan operasi kepada pasien yang dalam keadaan darurat, dimana alat yang akan digunakan untuk operasi dibersihkan di rumah sakit lain yang memiliki sterilator, ujarnya.

Direktur RSUD Abepura, dr. AK Mallisa, Sp.R mengatakan, daya tampung rawat inap yang ada di rumah sakit yang dipimpinnya sangat terbatas, dimana saat ini hanya berjumlah 144 tempat tidur (bed), sementara jumlah pasien rawat inap sejak awal Januari cukup meningkat. Pengunjung atau calon pasien rawat inap disarankan agar ke rumah sakit lainnya,

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Bagus Sukaswara mengatakan, salah satu soal mendasar di bidang kesehatan di Papua ini adalah gizi buruk. Hal ini dipaparkan dalam Rapat Kerja Bupati/Walikota se-Papua. Dijelaskan, permasalahan yang menyebabkan terjadinya gizi buruk itu antara lain karena kurangnya pengetahuan tentang makanan yang beragam, seimbang, bergizi dan aman. terbatasnya teknologi pengolahan pangan. Untuk itu perlu dilakukan kampanye makanan yang beragam, seimbang, bergizi dan aman bagi anak balita dan anak sekolah.

22 Februari

Berdasarkan data dari Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Papua (YPKM) Kabupaten Jayapura bahwa jumlah pekerja seks jalanan 50 orang, anak jalanan 23 orang dan untuk ibu rumah tangga (IRT) yang memiliki Pria Idaman Lain (PIL) 50 orang. "Data terakhir yang kami peroleh, untuk PSJ sebagai besar diakui pengaruh pergaulan dan lingkungan sekitar sementara untuk anak jalanan dikarenakan faktor ekonomi, sedangkan IRT yang memiliki PIL dikarenakan sang suami terlebih dahulu mempunyai WIL atau suka bertindak kasar dalam rumah tangga," ungkap Koordinator Regio Mamta YPKM, Sherif Tokoro.

19 Maret

Kepala Sub Bidang Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Reginhald H. mengemukakan bahwa kematian ibu dan anak disebabkan oleh 2 hal, diantaranya pendarahan dan sesak nafas, Namun kedua penyebab tersebut dapat ditekan dengan bantuan penanganan medis yang maksimal dan penguatan tenaga serta pemberian makanan yang cukup. Selain itu ditambahkan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk memeriksakan secepat mungkin kondisi kehamilan serta harus merujuk ke rumah sakit jika perlu.

28 Maret

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dr. Sujono Angkasa, MPA, untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Kota Jayapura, maka untuk Tahun 2008 ini ada dua Puskesmas yang mendapatkan bantuan kendaraan Puskesmas Keliling yaitu Puskesmas Elli Uyo dan Puskesmas Abepura, Bantuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya bantuan kendaraan, diharapkan Puskesmas dapat melayani masyarakat disekitarnya dengan baik.

C. Kesejahteraan umum

8 Januari

Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH mengatakan, selama ini terjadi salah kaprah dalam konsep pembangunan Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia selalu diartikan sebagai peningkatan kapasitas orang Papua, padahal masih ada banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya kecukupan pangan dan gizi, akses pelayanan kesehatan yang bermutu, perbaikan jangkauan pelayanan dan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan di Papua.

29 Januari

Bupati Keerom, Drs. Celsius Watae mengatakan, bahwa walaupun sejumlah daerah di Pemerintah Kota Jayapura hingga saat ini belum menerima dana rencana strategi pembangunan kampung atau Dana Respek yang diprogramkan oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu, S.H untuk Kabupaten Keerom, Dalam tahun anggaran 2007 sudah menerima, sedangkan tahun 2008 sedang dalam proses dengan jumlah sebesar Rp. 100 juta untuk setiap kampung.

31 Januari

Walikota Jayapura Drs, M.R. Kambu, M.Si mempertegas simpang-siurnya dana pemberdayaan Kabupaten, kelurahan dan Kampung (Dana Respek) yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Gubernur No.141 tahun 2007. "Pihak Pemerintah Provinsi Papua sebagai pemberi mengakui sudah menyalurkan bantuan tersebut ke seluruh Kabupaten, Kota, Kelurahan dan Kampung namun pihak yang berhak menerima bantuan tersebut misalnya Kampung dan Kelurahan di Kota Jayapura belum menerimanya", katanya.

Pelaksana tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura, Rudolf Rumbino, ST, M.MT pasar Hamadi yang terbakar pada tahun 2006, sesuai perencanaan bisa diselesaikan pada tahun 2007 namun ternyata sampai sekarang masih terus dikerjakan dan ditargetkan baru bisa diselesaikan pertengahan tahun 2009.

1 Februari

Gubernur Provinsi Papua Barat, AO Atururi mempertanyakan Dana Instruksi Presiden (Inpres) yang direncanakan akan dikucurkan pada akhir 2007 tetapi hingga sampai awal Januari 2008 belum juga terealisasi. Beliau juga mengatakan bahwa pihaknya. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Biro Keuangan Eddy Sirait kalau Pemprov Papua Barat belum mendapatkan dana Inpres. Dan kalau dana Inpres sudah ada, maka akan diturunkan langsung ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

13 Februari

Waki Presiden dan Direktur Hubungan Eksternal PT Freeport, August Kafiar usai bertemu Wapres Jusuf Kalla mengatakan, perusahaan tambang PT. Freeport Indonesia berencana membangun pabrik semen di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Pabrik tersebut akan memanfaatkan limbah *tailing* (pasir sisa hasil tambang) sebagai bahan baku, selain kapur dan polimer. Menurutnya, MoU sudah ditandatangani antara Freeport dan Pemda Provinsi Papua.

15 Februari

Sugianto, salah satu korban pembongkaran bangunan yang dilakukan Satuan Polisi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kota Jayapura di Skyland Jayapura, menilai Trantib kurang profesional sebagai sebuah Lembaga Pemerintah. Menurutnya, ia memiliki surat lengkap tentang tanah yang ia dirikan bangunan tersebut. "Tidak mungkin saya berani membangun di atas tanah bukan milik saya", ujarnya.

17 Februari

Dua kampung di Kabupaten Jayapura yaitu Yokiwa, Distrik Sentani Timur dan Kampung Klaisu, Distrik Gresi Selatan, menolak Program Beras Miskin (Raskin) di kampungnya. Alasan penolakan, karena warga mengaku sudah cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Kami melihat Raskin yang diberikan selama ini kualitasnya tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat", jelas Kepala Kampung Yokiwa, Barnabas Awoitauw di depan Bupati Jayapura Habel Mekias Suwae, S.Sos,M.M dan Duta Besar Amerika Serikat saat berkunjung ke Kampung Yokiwa.

21 Februari

Karena tidak menerima honor selama tiga bulan, seorang honorer Kantor Museum Negeri Waena di Waena Expo mengamuk dan melakukan pengrusakan terhadap kantor tersebut dan akhirnya yang bersangkutan harus berurusan dengan pihak kepolisian. Menurut Kapolsek Abepura AKP. Dominggus Rumaropen, S.Sos bahwa pegawai honorer tersebut yang melakukan pengrusakan akan dijerat dengan pasal 406 tentang pengrusakan dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Kepala Bappeda Provinsi Papua, Alex Rumaseb mengatakan, Program Strategi Rencana Pembangunan kampung (Respek) untuk 2007 dilaksanakan melalui dua tahap. Tahap pertama setiap kampung mendapat dana Rp 100 juta dari Pemerintah Provinsi dan Rp 100 juta dari Kabupaten/kota setempat. "Pertanggungjawaban tetap ada, dimana 2007 ada dua tahap. Tahap pertama sudah diturunkan dan tahap kedua belum dibagikan karena harus dipertanggungjawabkan dulu baru dibagikan. Dan dari hasil evaluasi memang banyak kampung yang belum memberikan laporan pertanggungjawabannya," ungkapnya.

22 Februari

Anggota Korem/172/PWY lewat Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) membangun sebanyak 16 unit rumah layak huni dengan menggunakan dana Otsus sebesar Rp 1,068 miliar di kampung Mpsso, Distrik Muara Tami, kota Jayapura Dan penyerahan kunci rumah tersebut dilakukan di Balai Pertemuan Kampung Mosso yang diserahkan langsung oleh Danrem 172/PWY Kolonial Inf. Burhanudin Siagian kepada Pemerintah Provinsi yang diwakili oleh Kasubdin Cipta Karya Ir. Darwin Siagian, M.MT. Selanjutnya akan diserahkan kepada distrik lalu kepada-kepala kampung dan selanjutnya diberikan kepada masyarakat yang berhak menghuni rumah tersebut. Dalam acara itu Danrem berpesan kepada masyarakat agar mereka bisa menggunakan rumah dengan sebaik mungkin dan ia minta masyarakat tidak boleh kembali lagi ke Papua New Guinea. Pembangunan ruas jalan alternatif Entrop-Waena yang terhenti sejak senin 13 Februari diduduki Keluarga Suku Hababuk, masih berlanjut. Ketua Dewan Adat Tobati Enggros Marthen I. Drunyi meminta semua pihak untuk duduk bersama menjerinikan soal ini.

27 Februari

Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yang menyalurkan bantuan dana block grant sebesar Rp 100 juta bagi, setiap kampung, tidak berjalan mulus di Kabupaten Pegunungan Bintang, hingga saat ini 91 kampung di Kabupaten Pegunungan sama sekali belum menerima dana Block Grant itu.

4 Maret

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jayapura, maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban bangunan-bangunan liar di pinggir jalan. Mereka berhasil menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan liar di Distrik Heram, Kabupaten Jayapura termasuk sebuah bengkel milik Wardjo karena surat-surat bengkelnya suda habis masa berlaku. Menanggapi hal itu, Wardjo mengatakan bahwa dia rela sebab Satuan Polisi Pamong Praja sudah bekerja sesuai aturan dari Pemerintah Kota.

12 Maret

Kepala BPMD Kabupaten Keerom, Melianus Kareth melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kabupaten Keerom tahun 2008 pihaknya akan membangun 55 buah rumah untuk masyarakat. Rumah-rumah tersebut akan dibangun di tempat-tempat terasing atau kampung yang jauh dari kota, seperti Kampung Kaisenar, Distrik Arso dan beberapa Kampung terasing lainnya.

Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang membidangi Kesejahteraan, Yosepina Pigay, S.Sos mengatakan kecewa kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Sosial sebab selama tiga tahun anggaran telah menjanjikan akan membangun tempat tinggal bagi Yayasan Humania namun belum terealisasi. Padahal para Tuna Netra ini telah berulang kali menyampaikan aspirasi dan menanyakan realisasi atas janji dari Dinas Sosial untuk membangun tempat tinggal bagi mereka, Bahkan Komisi mereka sudah cukup menyampaikan hal ini berulang kali kepada pemerintah tetapi tidak pernah ditanggapi secara serius.

29 Maret

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura, Ir. Gading Butar-Butar mengharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menghimbau para Pengusaha air minum dalam kemasan agar tidak mengambil air dari mata air Cycloops juga masyarakat yang melakukan aktivitas di kaki gunung Cycloops agar jangan merusak ekosistem di kaki

gunung tersebut. Karena aktivitas tersebut mempengaruhi persediaan air bagi kebutuhan masyarakat yang selama ini masih bergantung pada mata air Cycloop.

D. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

1 Januari

Kasat Reskrim Polres Jayapura, Michael Irwan Thamsil S.Ik mengatakan sembilan sopir truk pengangkut kayu illegal dihukum 5 tahun penjara berdasarkan undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini dilakukan karena para sopir itu tidak memiliki dokumen yang lengkap.

31 Januari

Obyek Wisata, Monumen Sejarah peninggalan Perang Dunia Kedua di Hamadi dan pintu gerbang masuk Pantai Base-G diresmikan Walikota Jayapura, Drs, M.R. Kambu, M.Si untuk mendorong pengembangan pariwisata di Kota Jayapura.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Papua, Drs. Dominggus Rumbewas, S.H mengatakan di tahun 2008 ini, Dinas Kebudayaan berencana mengadakan seminar untuk menghimpun data berbagai macam suku bangsa di Papua dan selanjutnya akan dibuat peta khusus bagi setiap suku.

14 Februari

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir Jansen Monim, MMT. Mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua akan terus mencari jalan keluar untuk bisa melanjutkan rencana pembangunan jembatan Holtekam yang terhenti itu, baik dengan melobi ke pusat maupun lembaga donor lainnya yang mau membantu membiayai proyek ini yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 400 miliar. " jembatan ini sangat penting untuk menunjang pembangunan Kota Jayapura di masa mendatang". Katanya

Masyarakat Ugimba, Paniai yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat areal tambang Blok B Gresberg di Tembagapura, minta dilibatkan dalam kontrak karya PT Freeport. Mereka mengancam bakal menutup segala aktivitas pertambangan Freeport, selain itu mereka juga bakal mendemo Gubernur Barnabas Suebu, SH dengan menduduki gedung negara, jika aspirasi mereka tentang pengakuan hak ulayat di areal pertambangan tersebut tidak digubris. Hal ini sampaikan Ketua Lembaga Adat Masyarakat Ugimba Paniai (LAMUP), Musa Tipagao di Jayapura.

Masih adanya aktivitas pengeboran nikel di Tablasupa Kabupaten Jayapura oleh PT. Sinar Indah Persada (SIP) yang sudah dilarang, membuat Bupati Jayapura, Habel 1Melkias Suwae, S.Sos. MM marah. Dengan tegas ia memerintahkan eksplorasi nikel tersebut segera ditutup.

Tanpa mengesampingkan peranan HPH dalam membuka keterisolasian dan membangun prasarana jalan di Kabupaten Sarmi, HPH diminta untuk tunduk dan mengikuti Peraturan Bersama Gubernur (Perbergub) Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 163 dan Nomor 16 tentang pembatasan Ekspor Hasil Hutan dalam wilayah Sarmi. Harapan tersebut disampaikan oleh Bupati Sarmi Edward Fonataba, MM ketika membuka kegiatan penjelasan Perbergub Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Nomor 163 dan Nomor 16 di Aula Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdik) Bumi Petam di Kota baru Petam. " ketidakhadiran para pengelola HPH dalam kegiatan

ini, menunjukkan ketidakpedulian atau malas tahu HPH yang beroperasi di Kabupaten Sarmi, saya minta Kadinas Kehutanan menggelar pertemuan ulang dan memanggil mereka semua," tegas Bupati. Kelima HPH yang beroperasi di wilayah hutan Kabupaten Sarmi adalah PT. Wapoga Mutiara Timber, PT. Salaki Mandiri Sejatera, PT. Mondialindo S. Pratama, PT. Bina Kenip Jaya, PT. Bina Balantak Utama dan PT. Mamberamo Alas Mandiri.

19 Februari

Upaya penyulundupan kekayaan alam Papua nampaknya masih terus terjadi. Buktinya, penyelundupan 333 keping kenari dengan tujuan dijual ke Surabaya berhasil digagalkan pihak Karantina Ikan Biak, di Bandar Udara Kaisepo. " Kami awalnya mencurigai kalau dos itu bukan ikan asin, sehingga kami bersama petugas bandara membuka dos itu. Ternyata bukan ikan asin, tapi keping kenari," kata Kepala Satker Karantina Ikan Biak, Junaedi, S.Pi.

21 Februari

Mahasiswa Tanah Merah dan Lembaga Adat melakukan aksi menolak PT . Sinar Indah Persada (PT SIP) dan PT Tablasupa Nikel Mining (PT. TNM) yang kini sedang melakukan penggalian nikel di Kampung Tablasupa, di depan kantor DPRD Kabupaten Jayapura. " Kami minta agar saat ini juga bupati turun dan menghentikan kegiatan di sana. Jika perlu dengan membawa aparat keamanan untuk memasang garis polisi di lokasi dan tidak perlu menunggu lama", tegas Yehuda Apesedanya, Ketua Tim 7 dari Yapase.

25 Februari

Rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk memindahkan warga yang berada di kawasan cagar alam Gunung Cycloops seperti diungkapkan Gubernur Barnabas Suebu, SH baru-baru ini mengingatkan kerusakan cagar alam tersebut berdampak pada kualitas air serta fungsi penyerapan hutan itu sendiri, mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten Jayapura. "Pantas jika Provinsi merencanakan perpindahan mereka karena ini masyarakat imigran, Cuma perlu ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten," kata Wakil Bupati Jayapura, Zadrak Wamebu, SH, MM.

Ketua Dewan Adat Kampung Tablasupa, Yosias Sorontouw sekaligus sebagai wakil pemilik hak ulayat secara tegas mengatakan, aktivitas PT. Sinar Indah Persada (SIP) harus tetap berjalan. "Saya sebagai wakil keluarga pemilik hak ulayat lokasi tambang di Tablasupa ini, minta agar PT. SIP tetap melakukan aktivitas di Tablasupa, selain sudah memegang KP dari Provinsi, P.T. SIP ini juga sudah melakukan pendekatan yang baik kepada warga pemilik, ungkapnya.

Berdasarkan pengalaman menghadiri konferensi Danau sedunia ke-12 di India November 2007, Bupati Paniai, Naftali Yogi, menyatakan bahwa perwakilan 157 negara akan mengunjungi Danau Paniai guna menyaksikan keindahan dan keutuhan danau tersebut. Untuk itu pihaknya akan membangun infrastruktur jalan raya yang menunjang rencana tersebut.

26 Februari

Benny Wenda, Ketua Masyarakat Koteka di London, menyatakan bahwa dia tidak mengakui perjanjian BP dengan Pemerintah Indonesia. Meski ratusan keluarga di Teluk Bintuni telah direlokasi ke pemukiman baru dan polisi lokal telah dilatih, pihaknya menegaskan bahwa pembangunan itu tidak berkelanjutan. "Tanah Papua adalah tanah,

hutan, dan laut. Itulah supermarket dan mama kami. Jadi jika sekarang BP beroperasi di situ, ini merupakan genosida terhadap tanah dan binatang, satwa liar dan semua spesies. Ini bukan tanah Indonesia punya. Ini orang Papua punya. Mereka harus bicara dengan Orang Papua”.

27 Februari

Persiapan Festival Danau Sentani yang rencananya digelar bulan Juni nanti dipertanyakan Tour Leader asal Magdeburg, Jerman bernama Claudia Lang. dirinya yang mewakili 8 rekannya yang didampingi oleh penerjemah Andre Liem mengatakan sangat tidak masuk akal jika persiapan pertunjukan tingkat International itu hanya dilakukan dalam satu dua bulan. “Kami baru mengetahui bahwa ada Festival Danau Sentani setelah berada di Jayapura,” katanya di Sentani Square City (SSC). Dirinya menyarankan, momen tingkat internasional seperti ini melibatkan budaya lain baik dari pedalaman dan pesisir pantai, sehingga nantinya para pengunjung yang dari berbagai belahan bumi dapat merasa puas.

5 Maret

Tim KOMNAS HAM berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor untuk meminta masukan dari masyarakat adat terkait pro dan kontra tentang rencana peluncuran satelit di Kabupaten tersebut. Pada pertemuan itu, Sekretaris Dewan Adat Biak, Apolos Sroyer, mengatakan masyarakat ingin tahu tentang keuntungan dan kerugian dari proyek peluncuran satelit itu, namun sampai sekarang pemerintah tidak pernah memberikan penjelasan secara terperinci kepada mereka.

16 Maret

Masyarakat Kampung Tablasupa Kabupaten Jayapura melakukan aksi pemalangan terhadap Kantor PT. Sinar Indah Persada (SIP) di Kampung Tablasupa, yang mendapat izin dari Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan penggalian tambang barupa nikel sejak bulan Januari yang lalu. Menurut masyarakat, perusahaan tidak mengikuti aturan main yang diajukan dalam bentuk profil oleh Tim 12 yang dibentuk oleh Masyarakat Kampung Tablasupa.

25 Maret

Panitia Khusus (PANSUS) yang dibentuk oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diketuai oleh Hofni Simbiak untuk memantau pelaksanaan proyek pembangunan peluncuran satelit milik negara Rusia di Kabupaten Biak, Provinsi Papua, melakukan kunjungan ke Kabupaten Biak. Kunjungan panitia khusus itu bertepatan dengan kunjungan Duta Besar Rusia ke Kabupaten Biak. Dalam pertemuan itu ketua tim, Hofni Simbiak mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui tujuan dibangunnya proyek peluncuran satelit itu.

27 Maret

Pihak Adat Suku Dawir, mengadakan pemalangan terhadap Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, dilakukan karena pemerintah belum melakukan pelepasan tanah dimana kantor tersebut berada. Kuasa khusus Kepala Suku Dawir, Boy M saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua memiliki 3 buah sertifikat atas tanah adat Suku Dawir, namun tidak memiliki bukti surat pelepasan. Maka Suku Dawir menuntut atas tanah yang telah digunakan sejak tahun 1978 - 2007 sebesar Rp. 10 milyar.

Bagian II

Analisis Peristiwa

Dari lintasan peristiwa pada tiga bulan pertama di awal tahun 2008 ini, kita dapat mengikuti gambaran umum tentang perkembangan keadaan hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Papua. Gambaran umum pada tiga bulan ini diwarnai dengan berbagai macam peristiwa kunci baik di bidang hak-hak Sipil dan Politik maupun di bidang hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Di bidang hak-hak Sipil dan Politik, ancaman terhadap hak hidup orang Papua, virus KKN, sengketa pemekaran dan tuntutan Merdeka yang tak kunjung padam menjadi topik-topik utama.

Sementara itu di bidang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, soal tingkat kesejahteraan masyarakat, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam merupakan tema-tema sentral yang mengisi catatan HAM kita pada bulan-bulan tersebut. Mari kita ikuti analisis perkembangan Papua berikut ini:

I. Apakah hak hidup orang Papua sudah dilindungi?

Dalam tiga bulan pertama di awal tahun 2008, perlindungan hak hidup Orang Asli Papua sepertinya belum mengalami perubahan berarti. Berbagai peristiwa kunci menandai peta hak asasi manusia dalam triwulan ini seperti pembunuhan kilat, repatriasi pengungsi Papua dari PNG, pembungkaman kebebasan berekspresi, sekaligus berbagai langkah penanganan dari berbagai pihak yang tanggap terhadap keadaan di Papua dewasa ini.

Di permulaan tahun ini, kita kembali dikejutkan dengan tindakan sewenang-wenang TNI yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Saat sekelompok pemuda di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, sedang bermain kartu pada hari Kamis 31 Januari, sekitar jam 10 malam, salah satu teman mereka ditembak mati oleh tentara, anggota Yonif 756 Rajawali-Wamena. Menurut informasi yang dimiliki SKP, pada saat itu, anggota Yonif 756 Rajawali-Wamena, tengah melaksanakan patroli dan tiba-tiba melakukan penggeledahan terhadap satu rumah yang dicurigai ada kaitan dengan kelompok TPN/OPM Goliat Tabuni. Saat Omanggen Wonda membuka pintu, dia langsung ditembak mati.

Peristiwa ini mendapat berbagai reaksi. Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Lukas Enembe, S.IP secara jelas mengungkapkan kemarahannya atas peristiwa tewasnya Omanggen Wonda (25 tahun). Bupati bahkan mengatakan sebenarnya pasukan yang ditempatkan di Puncak Jaya kurang bersahabat dengan rakyat sehingga ketika bertemu dengan masyarakat dalam berpatroli langsung takut dan langsung mengeluarkan tembakan.

Salah seorang pemimpin Gereja di Papua, Socratez Sofyan Yoman, juga mengecam tindakan semena-mena tersebut dan dengan tegas mengusulkan dibentuknya tim investigasi independen.

Sementara itu pejabat Kodam seperti Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Imam Santoso telah menegaskan agar tentara tidak boleh bertindak kasar terhadap orang-orang yang berlawanan dengan pemerintah, sebab mereka bukan musuh tetapi saudara yang hanya memiliki perbedaan pandangan hidup.

Guna menangani hal ini Pangdam XVII/ Cenderawasih menyatakan pelaku penembakan terhadap warga di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, telah ditangkap dan ditahan di Makodam Jayapura untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada sidang Militer.

Terlepas dari tindakan hukum itu, tetap menjadi pertanyaan bagi kita mengapa nyawa manusia begitu mudah dihilangkan tanpa ada dasar samasekali dan bahkan tanpa mengindahkan prosedur hukum. Kita pantas bertanya apakah Wilayah Tingginambut wilayah perang sehingga pasukan militer dalam posisi siap tempur? Jika memang demikian dasar hukum manakah yang dipakai oleh TNI untuk melakukannya sebab kewenangan menyatakan perang hanyalah wewenang Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI? Jika Kabupaten Puncak Jaya bukan wilayah perang, mengapa perkara itu tidak mendapat kejelasan hukum seperti dijanjikan Pangdam?

Peristiwa serupa terjadi di Enarotali, Kabupaten Paniai, yang mengakibatkan jatuhnya korban di pihak masyarakat akibat bentrokan dengan aparat kepolisian. Sejauh ini juga tidak dilaporkan adanya penyelidikan atas peristiwa ini.

Melihat kenyataan ini kiranya ingatan penderitaan masyarakat kembali dibangkitkan dan daftar litani kekerasan diperpanjang. Kita masih ingat bahwa pada akhir tahun 2006 hingga awal 2007, wilayah Puncak Jaya dilanda kekerasan akibat konflik bersenjata antara TPN-OPM dengan TNI dan Polri. Masyarakat kiranya belum sembuh dari rasa takut termasuk mereka yang tinggal di tepian Danau Paniai akibat operasi pengejaran kelompok OPM yang dipimpin oleh Tadeus Yogi.

Soal kedua adalah yang mencuat ke permukaan adalah rencana pemulangan 600 orang pengungsi Papua dari PNG yang selalu mendapat stigma. Untuk itu sejumlah pihak menegaskan bahwa cap-cap semacam itu hanya akan melumpuhkan proses pembauran kembali para pengungsi tersebut. Peristiwa semacam ini bukan hal baru mengingat sudah terjadi sejak tahun 1980-an tetapi pola reaksi dan bertindak belum banyak berubah. Hal ini memang dapat dipahami mengingat seluruh pendekatan belum berubah. Pengungsi masih dicap sebagai pelintas batas sehingga seluruh alasan mendasar mengapa mereka lari ke negara tetangga tidak banyak dibicarakan. Apakah sebenarnya seluruh alasan tetap hendak dihindari?

Selain soal pembunuhan kilat dan repatriasi, pembungkaman kebebasan berekspresi kembali mewarnai peta situasi HAM kita seperti terbaca dalam penindakan polisi terhadap aksi demo di Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Serui, untuk menolak Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2007 dan menolak Otonomi Khusus. Peristiwa ini amat menyedot perhatian publik baik di Papua, Nasional, maupun Internasional.

Misalnya di Jayapura, ketika Front Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (FNMPPP) yang dikordinir oleh Markus Yenu berunjuk rasa, langsung dibubarkan oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Robert Djoenso, dengan alasan mereka tidak mengikuti prosedur/aturan hukum yang berlaku, bahkan Zakarias Horota, Elias Weah, Abu Muri dan Rosa Tapnesa harus dimasukkan ke sel polisi.

Hal yang sama juga dialami oleh pendemo di Manokwari, sekitar 9 orang ditahan dan menjalani proses hukum, ketika mereka menyampaikan aspirasi antara lain: Daniel Sakwa (35 Tahun), masyarakat; Noak Ap (25 Tahun), masyarakat; Leonardus Bame (21

Tahun), masyarakat; Markus Umpes (22 Tahun), Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari; Marten Luther (20 Tahun), Mahasiswa Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari; Edy Ayorbaba (30 Tahun), masyarakat; George Ayorbaba (25 Tahun), masyarakat; Ariel Werimon (34 Tahun), masyarakat; Silas Karlos May (16 Tahun), Pelajar pada salah satu SMP di Manokwari.

Menanggapi aksi penyampaian aspirasi itu, Kapolda Papua, Irjen Polisi Drs. Max Donald Aer mengatakan pihaknya akan memproses para pendemo yang berhasil ditangkap sesuai aturan hukum yang berlaku dengan alasan, mereka membentangkan Bendera Bintang Kejora yang dinyatakan sebagai lambang yang dilarang berdasarkan PP No. 77/2007 tentang Lambang Daerah.

Jika dicermati, aksi demo yang terjadi di Manokwari dan di Jayapura amat berbeda. Di Manokwari pendemo memang membentangkan bendera Bintang Kejora; sedangkan di Jayapura, pendemo hanya membawa spanduk yang dilukis bendera. Namun demikian, kedua kelompok tetap dikenai pidana makar.

Karenanya kita patut bertanya apakah para pendemo ini dapat dikenai tuduhan makar yang berarti usaha menggulingkan kekuasaan yang sah? Apakah sebuah demo damai dapat menggulingkan kekuasaan suatu negara? Apakah fakta di Jayapura dan Manokwari dapat membuktikan tuduhan itu?

Yang lebih aneh lagi adalah pemanggilan mama-mama pedagang noken oleh anggota Polresta Jayapura hanya karena mereka menjual noken dengan bendera. Akibatnya mama-mama ini berdemo ke DPRP bersama dengan kalangan mahasiswa dan didukung juga oleh SKP Jayapura yang selama ini mendampingi mereka hingga akhirnya mereka boleh berjualan kembali barang-barang yang sebelumnya hendak disita oleh polisi.

Kiranya sejarah kembali terulang bahwa kebebasan berekspresi dibungkam dengan dalih makar. Hingga kini belum ada upaya dari Pemerintah untuk menggali lebih dalam mengapa orang Papua menaikkan bendera dan berteriak minta referendum. Tindakan represif umumnya tidak menyelesaikan masalah tetapi memendam bom waktu karena penghukuman terbukti tidak membuat jera masyarakat untuk mengulangi tindakan yang sama dari waktu ke waktu tetapi menundanya saja. Kejadian serupa akan terulang dengan bentuk dan energi yang lebih kuat.

Tanggapan mengenai peristiwa ini datang dari berbagai pejabat tinggi di daerah. Wagub menegaskan agar proses hukum harus dijunjung tinggi dan tidak hanya dicap makar. Sementara itu, Majelis Rakyat Papua melangkah lebih jauh dengan menolak dengan tegas PP 77/2007. Penolakan itu dituangkan dalam suatu keputusan Pimpinan Majelis Rakyat Papua No. 03/PIM –MRP/2008, yang ditandatangani oleh Pimpinan MRP, Drs. Agus Alue Alua M, Th didampingi Wakil Ketua I, Ir. Frans A. Wospakrik, M.Sc dan Wakil Ketua II, Dra. Hanna Hikoyabi, tentang posisi Bendera Bintang Kejora dalam tata hukum Indonesia. Selain itu, Majelis Rakyat Papua juga meminta agar para tersangka kasus makar dilepas.

Menghadapi berbagai kunci tersebut yang mengancam hak-hak dasar orang asli Papua, berbagai lembaga baik di Papua maupun di tingkat internasional angkat bicara. SKP Jayapura mengangkat keadaan situasi HAM ini ke Dewan HAM PBB di Jenewa dan menyerukan agar ada tindakan tegas dari pemerintah Indonesia dan anggota Dewan

HAM untuk melindungi hak hidup orang Papua, khususnya terhadap praktik penyiksaan dan pekerja HAM.

Seruan serupa disampaikan oleh Uskup Oxford, Inggris, kepada Parlemen Tinggi Inggris agar Pemerintah mengambil tindakan nyata guna melindungi hak hidup orang Papua. Langkah ini relatif baru mengingat Inggris tidak memiliki banyak hubungan historis dengan Papua.

LSM *Human Rights Watch* dan AWPAS Sydney (kelompok solidaritas untuk Papua) menyerukan agar sembilan orang terdakwa kasus Manokwari dibebaskan karena melanggar kebebasan berkumpul dan berpendapat. Dukungan semacam ini tentu amat membantu baik secara moral maupun politis bagi para pekerja HAM yang mendampingi tersangka, khususnya LP3BH di Manokwari dan SKP di Jayapura. Namun demikian, tetap tinggal pertanyaan sejauh mana proses hukum mampu menjamin kebebasan berekspresi warganya saat berhadapan dengan kepentingan politik pemerintah yang berkuasa. Kita perlu mencermatinya bersama dalam bulan-bulan berikut.

II. Virus KKN

Dalam tiga bulan pertama tahun 2008 ini, pemda-pemda di Papua disibukkan dengan berbagai masalah, khususnya virus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan dampak pemekaran wilayah makin menjadi tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang belum terpecahkan.

Virus KKN sebagai tantangan pertama disinyalir telah menyerang berbagai tingkat lembaga negara seperti bupati, anggota DPRD, anggota MRP, instansi-instansi pemerintah. Meski berbagai usaha telah dilakukan oleh berbagai lembaga baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah untuk menangani virus ini, senyatanya catatan peristiwa kita tetap ternoda oleh dugaan tindak pidana korupsi. Pada akhir bulan Januari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua dan Badan Pengawasan Pembangunan Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Keerom melakukan audit terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Keerom tahun 2007. Meski hasilnya belum diumumkan kepada publik, tetapi Ketua II DPRD Kabupaten Keerom bertekad untuk menindaklanjuti jika memang ada temuan penyimpangan.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura, Mahfud Mannan, SH MH mengatakan masalah dugaan korupsi di MRP sedang ditangani oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH. Menurut Mahfud Mannan, hal tersebut harus sesuai aturan, yakni apabila kasusnya berupa kasus dugaan korupsi maka harus diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) lalu ke Kejaksaan Agung kemudian diteruskan ke Kejati. Apabila indikasi pelanggarannya hanya berupa kesalahan administrasi, maka terlebih dahulu ditangani oleh Gubernur.

Walaupun proses pengawasan terhadap keuangan negara telah dilakukan dengan baik di daerah, namun Pemerintah kurang menghemat sehingga Menurut Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua, Dr Achmad Hatari, SE, M.Si Pemerintah Provinsi Papua mengalami pemborosan anggaran sebesar Rp 87 miliar. Hal itu diakibatkan banyaknya struktur organisasi dalam tubuh Pemerintah Provinsi Papua, bahkan Ketua Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Marthen R Marey, S.H mengatakan pihaknya

sulit untuk memantau penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Kabupaten dan Kota di Papua.

Langkah pemberantasan virus korupsi terus dilakukan oleh pihak Polda Papua selaku aparat penegak hukum. Polda Papua telah mengirim enam surat kepada Presiden untuk dapat memeriksa beberapa bupati di Papua yang diduga terlibat korupsi. Catatan ini memang memalukan tidak hanya karena jumlah pejabat yang diindikasikan korupsi tetapi terlebih karena tindak pidana itu dilakukan terhadap dana publik bagi masyarakat Papua yang berada dalam tingkat kemiskinan ekstrem (peringkat kedua termiskin di Indonesia). Amat ironis bahwa pejabat-pejabat Papua yang seharusnya berpihak pada rakyat dengan membelanjakan uang rakyat sesuai peruntukannya ternyata hanya sebatas pidato politik di mimbar kampanye dan media massa tentang kesejahteraan rakyat.

III. Sengketa pemekaran tanpa ujung

Tantangan lain yang makin rumit dan tengah dihadapi adalah dampak dari pemekaran mulai dari tingkat distrik, kabupaten, hingga provinsi. Dampak yang dimaksudkan adalah penataan wilayah dan kelengkapan aparat pemerintahan yang dituntut oleh struktur baru. Keruwetan pemekaran di tingkat kampung dapat dibaca dari peristiwa unjuk rasa pada tanggal 10 Maret 2008 oleh warga Distrik Sentani Timur dipimpin oleh Ikatan Mahasiswa Papua asal Sentani di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jayapura, guna menuntut agar keempat Kepala Kampung yang terpilih secara demokrasi, yaitu Kepala Kampung Yokiwa, Noklola, Ayapo dan Nandali agar segera dilantik.

Di tingkat kabupaten, salah satu kabupaten yang baru dimekarkan dan terus mengalami persoalan di atas adalah Kabupaten Mamberamo Tengah atau dikenal dengan nama Mamberamo Raya. Sejak dimekarkan kabupaten ini belum memiliki Sekretaris Daerah yang definitif untuk melaksanakan roda Pemerintahan di Kabupaten tersebut sehingga pada tanggal 28 Maret 2008, Wempi Bilasi sebagai Ketua Dewan Adat Mamberamo bersama komponen Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Toko Masyarakat dan Toko Agama mendesak Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH segera menunjuk dan menetapkan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya yang definitif.

Lebih dari itu, kabupaten yang baru dimekarkan sudah melahirkan aspirasi baru untuk memekarkannya lagi seperti rencana pemekaran Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deyai. Kabupaten yang belum lama berdiripun seperti Yahukimo dikabarkan hendak dimekarkan menjadi empat kabupaten baru meski berita ini dibantah oleh Ketua DPRD Yahukimo.

Pergolakan politik merebut jabatan tidak hanya ditampilkan melalui politik pemekaran tetapi juga di muka publik oleh para bupati Pegunungan Tengah yang memboikot Musrembang Pemprov Papua setelah mereka protes terhadap kebijakan Gubernur Papua mengenai dana infrastruktur yang dinilai tidak dikucurkan secara merata di pegunungan. Di hadapan negara-negara donor, lima bupati (Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, Jayawijaya, dan Boven Digul) mempertontonkan adegan *walk-out* setelah tanggapan mereka terhadap gubernur tidak diindahkan. Sementara itu gubernur sendiri tidak melanjutkan dialog tersebut dan menyerahkannya kepada wagub sehingga pada akhirnya tidak dicapai kata sepakat atau jalan keluar apapun. Masing-masing hanya berpolemik di media bahkan muncul ancaman membentuk provinsi baru Pegunungan Tengah agar kelima bupati dapat mengatur keuangan sendiri.

Tindakan ini patut untuk disimak di tengah segala macam pidato indah tentang pemekaran karena mengungkapkan realitas ketatanegaraan yang selama ini tidak banyak terungkap ke publik. Mata masyarakat terbuka karena senyatanya pejabat mereka tanpa malu-malu bertengkar soal dana infrastruktur dan bukan soal nasib rakyat. Kepentingan rakyat tidak lebih sebagai dalih yang terus dipajang tanpa isi. Celakanya adalah daya pikir masyarakat juga terbatas sehingga tidak mampu mengikuti dengan teliti permainan para politisi ini.

Sengketa menjadi makin panas saat kita menyimak perjuangan Pemda Kabupaten Merauke dengan Provinsi Papua Selatan. Keberangkatan Tim 80 dari Papua Selatan (PAPSEL) yang diketuai Yosep Y. Mahuze ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan dengan Sekretaris Menko polhukam, Mayjen TNI Rumulo R. Simbolon, merupakan satu bagian kecil dari rangkaian proses panjang. Tim 80 dari Papua Selatan mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Amanat Presiden (AMPRES) untuk pemekaran Papua Selatan yang akan melempangkan jalan menuju PPS. Contoh ini menggarisbawahi betapa kepentingan rakyat sudah tidak berarti samasekali dalam perjuangan semacam itu.

Dengan mencermati berbagai perkembangan tersebut, kita patut bertanya apa peran DPRP/ DPRD sebagai pihak yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan? Dimana suara mereka yang biasa nyaring bunyinya saat sidang anggaran? Di mana mereka saat rakyat membutuhkan lembaga yang diberi mandat mengangkat suara atas nama rakyat? Inilah realita politik yang kita hadapi dan rakyat kita terbius olehnya sehingga tak mampu angkat bicara juga.

IV. Tuntutan aspirasi M(erdeka)

Catatan dinamika aspirasi M dalam kurun waktu tiga bulan ini diwarnai oleh 'kepulangan' dua tokoh OPM, Nick Messet dan Franzalbert Yoku, dan demo referendum. Keduanya amat bertolak belakang.

Menarik untuk mengamati kepulangan dua aktivis tersebut karena seakan ada panggung besar yang disediakan bagi mereka. Ada penyerahan tanda kewarganegaraan di Sentani; ada liputan di media; ada silaturahmi dengan pejabat-pejabat tinggi di Papua. Peristiwa-peristiwa ini seakan hendak mengatakan bahwa dulu mereka ini adalah buronan negara dan sekarang telah ditundukkan.

Peristiwa demo referendum persis sebaliknya. Kelompok mahasiswa Papua yang tergabung dalam FNMPP menuntut agar rakyat Papua diberi hak pilih baru karena Otsus dinilai gagal. Tuntutan ini penting dicermati mengingat bahasa yang dipakai berubah karena tidak lagi memakai kata 'merdeka' yang sudah dilarang dan dikejar aparat keamanan dan aparat pertahanan. Di tengah segala hiruk pikuk pemekaran ternyata tetap ada suara yang secara tegar melawan arus. Apakah ini kejadian insidental dan terisolir ataukah mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tetap hidup namun terpendam?

Aspirasi M kiranya tetap menjadi perhatian besar dari pemerintah khususnya aparat keamanan dan pertahanan, dari rakyat Papua, dan berbagai kelompok solidaritas di luar negeri. Tak dapat dipungkiri pokok ini amat peka bagi semua pihak karena langsung menyangkut eksistensi Papua di masa lampau, sekarang ini dan ke depan. Kita dapat

menantikan bahwa ungkapan baik yang halus maupun tajam akan mengemuka di waktu-waktu mendatang dari pihak-pihak tersebut di atas hingga ada kerangka kerja baru yang disepakati bersama guna membahas dan mencari jalan keluar yang bermartabat. Pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah, polri, TNI, rakyat Papua siap berdialog mengingat dialog tahun 1999 berakhir dengan masing-masing pihak jalan sendiri?

V. Konflik tanah semakin marak

Sentani kembali mencuat di publik karena sengketa tanah yang tak kunjung usai. Sengketa itu menyangkut tanah Misi Adven, tanah yang dipakai sebagai perkantoran pemerintah, dan tanah yang dipakai sebagai sekolah. Amat memprihatinkan bahwa fasilitas umum dan fasilitas sosial menjadi sasaran sengketa tanah yang tak kunjung usai.

Akibatnya adalah layanan umum dan layanan sosial juga terganggu karena pihak pengelola layanan merasa tidak terjamin kepemilikannya karena setiap saat pihak 'tuan tanah' dapat saja melakukan pemalangan dan aparat penegak hukum tak berdaya menghadapinya. Rendahnya kepastian hukum pertanahan membuat berbagai pihak juga sulit merencanakan pengembangan-pengembangan layanan mereka karena persis aset paling fundamental, yakni tanah mereka, tidak dilindungi oleh hukum.

Fakta-fakta ini menunjukkan adanya problem serius dan mendesak tetapi terus terpendam mengenai pentingnya pembaruan hukum agraria mengingat perkara serupa terjadi di berbagai tempat di Papua dan boleh jadi di seluruh Indonesia. Hingga kini secara resmi sebutan 'hak ulayat', 'tuan tanah', 'pemilik hak ulayat', atau 'masyarakat adat' tidak dikenal dalam hukum pertanahan.

Dalam rangka Otsus sebenarnya terdapat peluang untuk melakukan pembaruan hukum agraria khusus di Papua agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terumus jelas dan pasti sehingga proses pembangunan, investasi, pengembangan layanan-layanan sosial dan layanana dapat berjalan dengan baik sekaligus hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya terlindungi. Perlindungan ini perlu dirumuskan dalam perdasus.

Kita boleh meramal bahwa cita-cita ini masih jauh di langit karena hingga kini belum satu perdasuspun dibuat oleh DPRP meski berbagai konsep perdasus sudah ditawarkan oleh MRP, kalangan Ornop ataupun Pemda Provinsi Papua. Sampai kapan wakil rakyat ini harus menunggu?

VI. Pemenuhan hak atas pendidikan makin merosot

Kenyataan yang terjadi pada tiga bulan pertama tahun 2008 ini menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat kepedulian pemerintah terhadap masyarakat sangat kurang sehingga pemenuhan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan kesejahteraan umum belum dipenuhi dengan baik.

Meski banyak pejabat di Papua terus mengatakan tingkat pendidikan di Papua terus merosot, langkah-langkah pemda-pemda untuk mengatasi masalah ini belum menunjukkan hasilnya. Publik Papua mencatat bahwa masalah kesejahteraan guru-guru di kampung-kampung kurang diperhatikan. Hal itu dibuktikan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke, Drs. Nicolaus Fredy Talubun, M.Pd

mengatakan sangat mengharapkan Pemerintah dapat memperhatikan nasib para guru yang bertugas di luar kota dengan membangun perumahan guru. Hal itu dikatakan sebab kebanyakan guru yang bertugas di luar kampung tidak mempunyai tempat tinggal sehingga mereka harus menyekat ruangan kelas yang kosong untuk dijadikan sebagai tempat tinggal sebab tidak ada perumahan bagi mereka untuk tinggal.

Nasib serupa terjadi pada guru-guru di Kabupaten Jayawijaya. Ratusan guru kembali melakukan aksi demo di depan kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya. Aksi ini dilakukan karena para guru di Kabupaten Jayawijaya merasa tidak puas terhadap pembayaran dana kesejahteraan guru yang sebenarnya diperuntukkan bagi para guru yang bertugas di daerah terpencil, namun kenyataannya banyak diterima oleh para guru yang bertugas di perkotaan.

Di Nabire, Forum Guru mengancam memboikot ujian nasional jika uang lauk pauk tidak dibayarkan sesuai aturan karena Pemkab Nabire hanya membayar Rp. 10 per hari sedangkan SK Gubernur mengatakan Rp. 25 per hari.

Selain kesejahteraan guru khususnya guru SD tetap bermasalah, dunia pendidikan tidak bebas dari korupsi seperti dilaporkan di Biak dengan proyek fiktif pengadaan mebel untuk SMA Katolik Biak.

Catatan-catatan peristiwa ini menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan terus makin jauh dari kenyataan. Pendidikan dasar yang terus dikatakan oleh berbagai pejabat Papua merosot ternyata tidak ditangani secara sistematis. Guru-guru harus berdemo agar hak hidup mereka dipenuhi. Jika mereka tidak tenang bekerja karena kebutuhan primer dan hidup mereka tidak terjamin, bagaimana mungkin mereka bisa mengajar dan mendidik generasi muda Papua dengan baik? Kiranya slogan 'pahlawan tanpa tanda jasa' atau 'abdi negara' telah secara resmi diberi arti baru tetapi kenyataan di lapangan masih seperti saat Orde Baru berkuasa.

VII. Hak atas kesehatan terbengkalai

Tak jauh berbeda dengan pemenuhan hak atas pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat Papua setali tiga uang. Problem kesehatan menyangkut berbagai hal yang saling berkaitan seperti penyakit, ketahanan pangan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan peraturan atau kebijakan yang mengatur layanan kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya anggaran negara. Karena itu marilah kita simak catatan peristiwa utama yang menyangkut unsur-unsur tersebut.

Penyakit dasar seperti ISPA dan malaria tetap merupakan ancaman serius dan tidak tertangani. Sedangkan secara khusus situasi keprihatinan masih terlihat di segi kesehatan, pada awal tahun 2008 ini penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) dinyatakan meningkat. Hal ini disampaikan dr. Alexander M Thesia. ISPA terbukti meningkat di Puskesmas Kotaraja yang umumnya anak-anak sedangkan yang menjadi peringkat kedua adalah malaria tropika, penyakit kulit dan diare.

Selain penyakit dasar, masyarakat Papua dihadapkan dengan ancaman penyakit modern yang sangat mematikan, yaitu AIDS. Setiap bulan Dinkes Provinsi Papua mengeluarkan data penderita HIV dan AIDS dan jumlahnya terus meningkat, khususnya di Kabupaten Merauke. Menurut Kabid Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, jumlah orang yang terkena

HIV-AIDS di Kabupaten Merauke terus bertambah. Terhitung tahun 1992 sampai tahun Desember 2007 berjumlah 969 orang (angka kumulatif).

Selain penyakit, problem gizi buruk merupakan salah satu faktor lemahnya daya tahan masyarakat terhadap berbagai penyakit dasariah di atas. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, gizi ini amat berkaitan dengan ketahanan pangan, pengetahuan masyarakat akan pengolahan makanan, pola makan, dan tak kalah penting, teknologi pengolahan pangan. Paparan ini disampaikan kepada para bupati dan walikota se-Papua dengan maksud agar pejabat pemda tertinggi di tingkat tersebut mengembangkan sentra-sentra pertanian yang mendukung pengembangan ketahanan pangan.

Dapat kita cermati bersama pejabat mana yang memiliki program kerja yang jelas untuk mengembangkan pertanian. Sebaliknya kita juga dapat mencermati bersama pejabat mana yang mengembangkan ruko dan industri ekstraktif. Semua orang—termasuk para pejabat—bahwa ketahanan pangan akan menyediakan gizi yang baik dan gizi yang baik akan mengembangkan generasi Papua yang cerdas dan sehat. Namun demikian, seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan bukanlah prioritas.

Unsur yang perlu kita simak adalah fasilitas kesehatan yang ada di berbagai tempat di Papua. Ketersediaan, pemeliharaan, dan keberlangsungan fasilitas kesehatan seperti posyandu, pustu, puskesmas dan rumah sakit masih jauh dari standar Otsus. Artinya prosentase anggaran daerah untuk layanan kesehatan masyarakat masih di bawah angka 15% seperti diperintahkan oleh UU No. 21/2001 tersebut. Kita pantas bertanya prioritas pemda-pemda ini ada di mana? Kesehatan langsung menyangkut nyawa manusia. Jika hal yang paling vital tidak terjamin, maka kelangsungan hidup suatu masyarakat juga tidak akan terjamin.

VIII. Antara dana dan kesejahteraan rakyat

Kesejahteraan rakyat di sini menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat selain kesehatan dan pendidikan yang sudah diuraikan di atas. Pemenuhan ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Dari catatan peristiwa di atas kami ambil pokok-pokok terpenting seperti dana respek, dana raskin, dana block grant.

Pemprov pada triwulan ini tengah menggalakkan program respek sebagai tindak lanjut dari Turkam Gubernur Papua tahun lalu. Sebagai tindak lanjut dari kunjungan tersebut, Gubernur menurunkan dana sebesar Rp. 100 juta per kampung. Namun yang menarik disimak adalah tanggapan dari Bupati Keerom dan Walikota Jayapura yang menyatakan bahwa mereka belum menerima dana tersebut. Pernyataan ini menarik karena yang berkomentar adalah para pejabat bukan kepala kampung atau orang kampung yang memang menjadi sasaran bantuan.

Timbul pertanyaan di benak kita mengenai bagaimana mekanisme penyalurannya? Apakah langsung ke kampung-kampung atau melalui bupati atau walikota? Kepala Bappeda Provinsi Papua menjelaskan bahwa dana respek disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama disalurkan dari Pemprov ke kampung dan tahap kedua disalurkan oleh pemkab atau pemkot dengan syarat tahap pertama sudah dipertanggungjawabkan. Inilah yang menjadi tantangan bagi semua pihak: mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban. Siapa bisa mengontrol aliran dana tersebut? Apakah Gubernur harus turun sendiri mengontrol pelaksanaannya? Apakah bupati/ walikota ataukah BPK?

Pertanyaan ini amat penting dijawab oleh pemerintah agar transparansi terjamin di tengah mewabahnya virus KKN.

Selain dana ini, dana block grant rupanya juga tengah menjadi sorotan kalangan pejabat pemerintah salah satunya di Pegunungan Bintang. Keluhan mirip dengan dana respek yakni mereka belum menerima dana tersebut.

Dari dua fenomena ini patut kita berpikir kritis mengapa isi pembicaraan pejabat tidak lair dari dana-dana? Memang benar bahwa dana tersebut adalah dana publik yang harus dibelanjakan bagi kepentingan publik tetapi apakah harus digembar-gemborkan di media bahwa dana belum cair. Boleh jadi ini satu indikasi kemacetan di dalam birokrasi sehingga harus menggunakan pers untuk mendapatkan tekanan publik.

Fenomena sebaliknya yang menarik digarisbawahi adalah penolakan program Raskin oleh dua kampung di Distrik Sentani Timur dan Distrik Gresi Selatan. Kejadian amat tidak lazim mengingat banjir proposal yang selalu melanda kantor-kantor pemerintah di Papua ini. Pernyataan penolakan ini menunjukkan harga diri sekaligus kesediaan bekerja di tanah sendiri. Langkah ini patut diikuti oleh kalangan lebih luas mengingat Papua yang begitu kaya akan hasil bumi.

Dua pola peristiwa ini kiranya menggambarkan sekelumit hidup sehari masyarakat di Papua yang ada dalam tegangan dana dan harga diri. Makin lama, makin banyak warga masyarakat yang larut dalam kepentingan pribadi akibat 'banjir' dana tanpa diimbangi kemampuan membelanjakan secara efektif. Inilah yang menjadikan masyarakat makin bergantung dan terongrong kemandiriannya.

IX. Sengketa Sumber Daya Alam (SDA)

Catatan kami selama triwulan ini menunjukkan bahwa Tanah Papua memang kaya akan mineral, hasil hutan, gas bumi, dan keindahan alam. Akan tetapi kekayaan alam itu tidak secara otomatis menjadi hasil yang bisa dinikmati tanpa ada eksploitasi. Di sinilah kunci permasalahan.

Tambang Nikel di Kampung Tablasupa, Emas di Tembapapura, gas bumi di Teluk Bintuni, HPH di Sarmi, tanah di Biak justru menjadi akar sengketa antarmasyarakat sendiri, antara masyarakat dengan pemodal, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Sengketa ini tidak jarang berakhir dengan bentrokan fisik dan tindak kekerasan sehingga berujung pada keterlibatan aparat keamanan (Polri) dan bahkan aparat pertahanan negara (TNI).

Sama halnya dengan konflik tanah yang telah diuraikan di atas, sengketa SDA ini senyatanya kurang mendapat perhatian dari pemerintah baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun pusat. Dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang melandasinya seperti [1] perangkat hukum yang dipakai amat lemah seperti harga kubikasi kayu merbau yang amat murah, [2] Perdasus yang mengatur SDA yang tak kunjung muncul, [3] kemampuan aparat pemerintah untuk mengontrol tata guna lahan yang bersifat terpenggal-penggal, [4] peraturan AMDAL yang hanya menjaring penggunaan SDA skala besar.

Di sisi lain, masyarakat adat dihadapkan pada perkembangan yang luar biasa cepat dengan pemekaran kabupaten yang menuntut adanya lokasi perkantoran pemerintah,

lapangan terbang, jalan raya, perumahan, sekolah, puskesmas, perumahan pegawai dsb. Selain itu, pemda-pemda baru perlu mengumpulkan PAD seperti dituntut oleh sistem pemerintahan yang ada; padahal mereka belum mampu 'berproduksi'. Tak heran bahwa eksploitasi SDA merupakan langkah tercepat meskipun belum tentu sebagai langkah yang paling bijaksana dengan berbagai pertimbangan di atas. Boleh jadi kita akan mendapatkan deretan masalah serupa di wilayah-wilayah lain dalam bulan-bulan mendatang.

Penutup : Tra urus rakyat, urus kepentingan masing-masing

Setelah kita mencermati rangkaian peristiwa di Bagian I dan analisis di Bagian II ini kiranya kita patut merefleksikan diri sejauh mana kita mengikuti secara kritis perkembangan yang terjadi di tengah kita dalam upaya pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya oleh pemerintah. Sikap kritis kita amat penting guna mengimbangi ketidakpedulian pemerintah di berbagai tingkat terhadap tugasnya mensejahterakan masyarakat.

Catatan kami menunjukkan bahwa rakyat tetap dalam posisi yang lemah. Dengan mudah mereka ditembak mati. Pengungkapan pendapat di muka umum dengan mudah dicap makar dan dihukum berat. Dengan mudah juga SDA mereka dirampas sehingga kemudian muncul berbagai sengketa tanpa ujung. Rakyat makin lapar, menderita gizi buruk, dan sakit karena gizi tidak dicukupi dan layanan kesehatan jauh di bawah standar resmi Otsus. Maka tak heran bahwa tingkat pendidikan generasi muda tetap di bawah rerata tingkat pendidikan nasional meski ada kasus luar biasa seperti George Saa.

Di tengah pidato manis berbagai parpol peserta pemilu, kita perlu secara kritis bertanya sejauh mana program-program kesejahteraan rakyat dirumuskan oleh lembaga-lembaga negara di Papua yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat. Sejauh mana masyarakat didengar dan keluhannya dijadikan rumusan kebijakan publik? Sejauh mana rakyat dibebaskan dari segala ketakutan yang membelenggu harga dirinya? Jangan-jangan kita sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah kita tra urus rakyat, urus kepentingan masing-masing.